

LAPORAN PENELITIAN

Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia



PENELITI :
Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc., MA dan
Hendra Harmain, M. Pd

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia Menurut *Stakeholder*.
- b. Kluster Penelitian : Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
- c. Bidang Keilmuan : Ekonomi Akuntansi
- d. Kategori : Kelompok
2. Peneliti : Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc., MA dan Hendra Harmain, M. Pd
3. ID Peneliti : 202806650213000
4. Unit Kerja : FEBI UIN-SU Medan
5. Waktu Penelitian : 7 bulan
6. Lokasi Penelitian : Indonesia
7. Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta)

Medan, Nopember 2018

Disahkan oleh Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M) UIN
Sumatera Utara Medan

Peneliti,
Ketua

Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
NIP. 195812311988031016

Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc., MA
NIP. 196506282003021001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc., MA

Jabatan : Dosen

Unit Kerja : FEBI UIN-SU Medan

Alamat : Medan Marelan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian “Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia” merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Nopember 2018

Yang Menyatakan,

Materai

6000

Aliyuddin Abd. Rasyid, Lc., MA
NIP. 196506282003021001

ABSTRAK

Laporan Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid memerlukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik dalam hal ini masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan keakuntan bilitasnya. berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis penerapan prinsip akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid di Indonesia. untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan rumus champion yang dirumuskan menggunakan daftar checklist dan pernyataan wawancara untuk menganalisis tingkat akuntabilitas laporan keuangan masjid di beberapa masjid di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan peneliti di 18 (delapan belas) masjid di Indonesia, terdapat 14 (empat belas) masjid yang berada pada bobot 51% - 75% (Moderately high association) berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini cukup mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut. Selanjutnya terdapat 4 (empat) masjid yang berada pada bobot 76% - 100% (High association up to perfect association) yang berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini sangat mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut. Oleh sebab itu dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia perlu menghadirkan nuansa akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan paling tidak perlu dihidupkan dengan pola tata buku yang benar dalam penyusunan dan pelaporannya menggunakan software yang seragam berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, kemudian dalam hal pengelolaan perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, tanggung jawab dan integritas, kemudian, perlu melakukan monitoring dan pengawasannya (audit).

Kata Kunci: Akuntabilitas, PSAK 45, rumus champion

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia, serta petunjuk Allah SWT yang begitu besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia". Sebagai bentuk kontribusi peneliti kepada pengembangan nasional, terkhusus dalam meningkatkan keakuntabilisan laporan keuangan masji di Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan memperoleh hasil dari analisis pencatatan laporan keuangan di masjid yang menjadi objek penelitian, serta dampak apa yang diberikan dari laporan keuangan yang sudah diterapkan. Kemudian untuk mengetahui bentuk penerapan prinsip akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid di Indonesia

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa pengerjaan peneliti ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, guna mengembangkan penelitian ini kearah yang lebih baik.

Medan, Nopember 2018

Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Transparansi dan akuntabilitas merupakan *trust* dalam semua kegiatan lembaga baik pemerintah (*public*) maupun *private* yang akan selalu dituntut transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya. Dari penjelasan itu kehidupan keagamaan (pengelolaan dana masjid) seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi, padahal di dalam Islam terdapat QS Al-Baqarah: 282.

Masjid tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah yang sifatnya berhubungan dengan Allah SWT saja, akan tetapi merupakan tempat yang dijadikan ummat Islam sebagai pegerat hubungan dengan sesama manusia terutama dalam pengelolaan dana ummat yang diserahkan pada pengelola mesjid (*takmir*) untuk kesejahteraan mesjid pada khususnya dan jamaah mesjid pada umumnya dalam memperoleh kenyamanan ketika beribadah di mesjid, sehingga bisa dikatakan mesjid merupakan organisasi nirlaba (*non profit oriented*). Oleh sebab itu mesjid secara langsung dan tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang efektif dan transparan kepada *stakeholder* dalam pengelolaan dana masjid. Dikarenakan mesjid memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (*takmir*) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan penerimaan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid, dalam hal pengeluaran masjid. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid (*Stakeholder*).

Akan tetapi sebagai lembaga keagamaan, sebagian besar Masjid menganggap tabu praktik akuntansi dalam pengelolaan dananya bahkan tidak tahu menahu bagaimana ilmu akuntansi bisa digunakan pencatatan dan pelaporan pengelolaan masjid yang ada.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan

ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (*takmir*) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid. Kemudian membuat laporan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Laporan Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid memerlukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik dalam hal ini masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan dari agama ini dijelaskan oleh QS. Al Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....

Dengan demikian, aktivitas penyerahan dana dari penderma/donatur kepada pengelola dapat disebut dengan transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan umat para pengguna masjid, dan dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya. Agar tidak terjadi kecurigaan dari jamaah, serta penyelewengan yang dilakukan pengelola masjid.

Misalnya permasalahan yang terjadi di Prabumulih Sumatera Selatan, dimana Tiga orang pengurus masjid yang mendapatkan bantuan berupa proyek pembangunan dan rehab oleh Pemkot Prabumulih pada tahun 2016, memenuhi panggilan penyidik kejaksaan negeri (Kejari) Prabumulih. Mengenai kejelasan dalam

pengelolaan dana bantuan sosial. Ketiga pengurus masjid tersebut menjalani pemeriksaan, sekitar 30 menit. Mereka ditanyai, tentang proyek yang berlangsung di masjid yang mereka kelola baik dari awal mula pengajuan proposal hingga selesai dibangun¹. Selanjutnya contoh Perkara kasus korupsi pembangunan masjid raya Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara yang melibatkan eks Bupati pada 2006-2010². Sehingga dari permasalahan kasus diatas bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan kepada pihak kepolisian adalah laporan keuangan yang akuntabel.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak, baik di perkotaan maupun di desa-desa. Kepastian dana mengalir pun selalu ada dalam jumlah yang relatif tidak sedikit. Namun, seringkali *takmir* masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran dalam pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, dana yang diperlukan langsung diambil sesuai kondisi yang terjadi pada saat itu juga untuk dialokasikan dalam suatu kegiatan. Tapi tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Misalnya terdapat masjid di Indonesia, masjid yang tidak menggunakan standar dalam pembuatan laporan keuangannya. Hal ini sangat riskan dikarenakan ketidak jelasan dalam metode pencatatannya dan memungkinkan tidak mencatat aset masjid dengan pencatatan yang jelas, sehingga tidak ada catatan yang jelas mengenai hilang atau rusaknya aset masjid³. Sedangkan SDM yang ditunjuk menjadi bendahara pada Masjid Ar-Rahman tidak mempunyai spesifikasi di bidang ekonomi tetapi mempunyai gelar di bidang lain.

¹ Abu, *Tiga Pengurus Masjid Diperiksa (Dugaan Penyelewengan Pembangunan Masjid)*, <http://palembang-pos.com/tiga-pengurus-masjid-diperiksa-dugaan-penyelewengan-pembangunan-masjid/>. Di Unduh 10 Mei 2018.

² Hairil Hiar, *Kasus Korupsi Masjid Masuk Sidang, Eks Bupati Sula Tak Ditahan*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2842801/kasus-korupsi-masjid-masuk-sidang-eks-bupati-sula-tak-ditahan>, Di Unduh 10 Mei 2018

³Hasil observasi awal dan wawancara dengan pengelola masjid yang hanya membuat laporan mutasi kas

Namun dalam hal ini peneliti menganggap perlunya meneliti tentang laporan keuangan Masjid, mengenai “pencatatan yang dilakukan oleh bendahara Masjid yang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, atau belum sesuai dengan prinsip akuntansi, dan bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid mengenai laporan keuangan masjid tersebut”.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban yang dibuat *takmir* (pengelola) masjid masih dalam bentuk sederhana, yaitu hanya menjelaskan laporan penerimaan dan pengeluaran dana masjid, tanpa melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitasnya.
2. Masih kurang pahamiya sebagian pengelola masjid dalam membuat laporan pengelolaan dana masjid yang akuntabilitasnya baik.
3. Pembuatan laporan keuangan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dana masjid.

Didasari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan masjid di Indonesia, serta dampak apa yang diberikan dari laporan keuangan yang sudah diterapkan?
2. Seberapa besar prinsip akuntansi yang sudah diterapkan?
3. Bagaimana bentuk Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan Masjid tersebut, serta dampak apa yang diberikan dari laporan keuangan yang sudah diterapkan (potensi keuangan masjid).
- b. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan masjid yang sesuai dengan prinsip akuntansi masjid.
- c. Untuk mengetahui bentuk Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia
- d. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengelola Masjid.

2. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat, diantaranya:

a. Secara Teoritis

Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini., serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pemahaman dalam materi perbankan, khususnya mengenai pengelolaan di organisasi nirlaba seperti halnya Masjid.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pengelola Masjid

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja para pengelola masjid dalam mengelola keuangan dengan menerapkan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi.

2) Bagi Pembaca

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal pengelolaan keuangan di Masjid serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORITIS

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV PRMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Masjid

Organisasi keagamaan merupakan organisasi nirlaba, karena organisasi ini didirikan tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Mengingat semakin berkembangnya umat Islam dan masjid di Indonesia, maka dana yang dibutuhkan untuk mendukung segala aktivitas dan biaya operasional masjid menjadi tidak sedikit jumlahnya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, sarana dan prasarana, serta pembangunan dan pembenahan masjid itu sendiri, sehingga sudah sepantasnya masjid sebagai organisasi nirlaba juga memperhatikan masalah pencatatan dan pelaporan keuangan.⁴

Akuntabilitas keuangan organisasi masjid bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang harus dikembangkan secara spesifik sesuai karakteristik khusus organisasi masjid. Penaksiran resiko dan penentuan aktivitas pengendalian akan menjadi kunci utama bagi pengembangan sebuah sistem pengendalian internal. Akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba juga akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung kinerja pengolahan yang lain, yaitu sumber daya manusia, infrakstruktur, dan perangkat pengelolaan keuangan. Keseluruhan elemen ini harus dipahami dan dikembangkan secara sistematis, sebagai salah satu upaya mempertahankan keberlanjutan organisasi dan pada akhirnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dan peran masyarakat sipil di Indonesia.⁵

Masjid merupakan organisasi nirlaba harus dan berhak untuk membuat laporan dan melaporkannya kepada para pemakai pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sudah sewajarnya mengingat hidup dan berkembangnya organisasi

⁴Ruci Arizanda Rahayu, transparansi dan akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid. Vol.4 No. 2, Oktober 2014 alam e journal.

⁵Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2088-0685 Vol.4 No. 2, Oktober 2014 Pp 631-638

masjid bersumber dari sumbangan, sedekah, atau bentuk bantuan sosial lainnya. Organisasi harus membuka diri terhadap hak masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, setidaknya terhadap anggota organisasi keagamaan tersebut.⁶

Informasi dapat diakses oleh siapa saja dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berniat buruk terhadap organisasi. Konsekuensi ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi karena kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan organisasi masjid akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid itu sendiri. Sebagian masyarakat termasuk didalamnya para pengurus masjid atau kenaziran masjid memiliki menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang (jumlah disumbangkan) kepada publik (jamaah) karena dianggap akan merusak nilai keikhlasan bagi para donatur yang memberikan sumbangan semata mencari ridho Allah SWT.

Namun demikian tak jarang sebagian masyarakat yang lain memandang perlunya laporan siapa dan jumlah sumbangan yang masuk dari donator, agar informasi mengenai posisi keuangan secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Situasi dilematis seperti ini menyebabkan para pengurus pada akhirnya merasa tidak perlu menyampaikan laporan penyumbang.

a. Sumber Keuangan Masjid

Sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat/jama'ah dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara suka rela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat suatu agama. Sumber dana dari umat bisa berbagai bentuk seperti Infaq, sedekah, zakat, fidiah, dan lain-lain sesuai dengan ajaran islam. Sumber keuangan masjid tersebut dapat berasal dari :

- 1) Dana pemerintah

⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK 45 Revisi 2011.

Dana yang diperoleh dari sumber pemerintah yang telah mengaggarkan dana tersebut untuk membantu kegiatan Masjid atau keperluan sosial.

2) Donatur tetap

Dana yang diperoleh secara rutin menyisihkan sebagian hartanya untuk Infaq diikuti dengan sedekah atau zakat.

3) Donatur bebas

Donatur dari lingkungan sekitar Masjid ataupun dari luar lingkungan Masjid. Dana ini dapat berupa zakat, Infaq, sedekah, maupun wakaf. Dana ini juga dapat diperoleh ketika mengadakan kegiatan, misalnya : sholat idul fitri dan idul adha, kegaitan ramadhan, lelang amal, dan lain-lain.

4) Kotak amal

Dana yang diperoleh dari masyarakat dengan menempatkan kotak amal jariah di pusat-pusat keramaian, toko, kantor, kotak amal permanen di pintu Masjid serta kotak amal yang di edarkan pada saat pelaksanaan ibadah shalat jum'at.⁷

B. Laporan Keuangan Masjid

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Untuk melihat posisi keuangan perusahaan tidak cukup dengan melihat laporan keuangan saja perlu adanya analisis laporan keuangan terhadap laporan keuangan.⁸

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca

⁷ Moh.E.Ayub, “*Manajemen Masjid*”, (Jakarta:Gema Insani Press:2012),h.59

⁸Widia Astuti, *Pengantar Akuntansi Keuangan*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h.12.

menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin dapat dilakukan dengan tulis tangan seperti yang dijumpai pada mesjid-mesjid kecil dan ada pula yang dikerjakan dengan mesin-mesin otomatis seperti kita jumpai pada mesjid-mesjid besar. Perkembangan teknologi yang pesat akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin-mesin pembukuan dan komputer untuk mengolah data akuntansi semakin banyak digunakan baik dalam mesjid besar maupun menengah.⁹

Laporan keuangan syariah adalah cara mengolah suatu informasi keuangan berdasarkan syariah aturan dan hukum islam agar menghasilkan suatu laporan yang memberi manfaat. Sistem akuntansi berbasis syariah muncul akibat rasa kurangnya suatu sistem akuntansi yang berdasarkan pada nilai-nilai islam oleh kaum muslimin.¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis

⁹Mhd.Syahman Sitompul, et Al., “ Akuntansi Masjid ”, (Medan:Febi UIN-SU Press,2015),h. 64.

¹⁰Ibid., h. 65

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹

Ayat di atas dapat ditafsirkan *hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai)* dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya.

Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan

¹¹Alquran Al Karim dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2003), h.59.

agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur.

Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian.

Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi.

Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya(1). (1) Masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain.

Al-Qur'ân mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.

Kata *dain* berasal dari kata *dana-yadiru* yang berarti memberikan (meminjamkan) kepada seseorang uang yang harus dikembalikan (dibayarkan kembali) dalam waktu tertentu yang disepakati bersama antara yang meminjamkan dengan

yang meminjam. Makna asal kata *ad-dain* adalah ganti yang diakhirkan atau ditunda.

Pada ayat di atas, Allah sangat menegaskan urgensi keadilan itu sendiri. Kata adil dan benar sejatinya menjadi patokan untuk membangun akuntansi syariah yang dapat menciptakan realitas tauhid. Informasi yang dihasilkan akuntansi syariah akan tercipta realitas tauhid, yaitu realitas yang sarat dengan jaring kuasa tauhid yang mendorong manusia pada kesadaran tauhid.¹²

b. Komponen dan Unsur- Unsur Laporan Keuangan Masjid

Komponen laporan keuangan pada umumnya memiliki perbedaan dengan laporan keuangan yang berlaku pada Masjid. Komponen laporan keuangan pada Masjid terdiri dari empat yaitu :

1) Neraca (*Laporan posisi keuangan/balance sheet statement of financial position*) adalah laporan dengan posisi keuangan perusahaan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal. Manfaat Neraca; prasarana untuk menganalisis fleksibilitas keuangan adalah sebagai pengukur bagi perusahaan akantindakan kedepannya, prasarana untuk menganalisis likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, prasarana untuk menganalisis solvabilitas adalah kemampuan perusahaan membayar hutang-hutangnya sebelum jatuh tempo.

2) Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan berupa aset, kewajiban dan net asset pemilik suatu Masjid pada tanggal tertentu. Unsur-unsur dari neraca antara lain :

a) Aset

Aset yaitu sumber daya yang dikuasai sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari keuntungan ekonomi di masa depan diharapkan mengalir pada entitas. Aset terdiri dari 2 bagian, yaitu aset lancar yang terdiri dari kas, persediaan, dan

¹²Azhari Akmal Tarigan, "*Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran*", (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 242.

aset tetap yang terdiri dari tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin.

Aset tetap memiliki 2 bagian yang berbeda, antara lain :

-) Aset tetap tidak terikat yaitu aset yang nilai manfaatnya lebih dari 1(satu) tahun.
-) Aset tetap terikat Sementara yaitu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas dalam jangka waktu yang disepakati, dan akan dikembalikan saat jatuh tempo.
-) Aset tetap terikat permanen yaitu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas secara permanen

b) Kewajiban

Kewajiban masa lalu yang dijadikan kewajiban masa sekarang dengan menyerahkan sejumlah daya/jasa.

c) Net Aset

Net aset atau disebut juga ekuitas merupakan sisa hak atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.¹³

d) Laporan Operasional

Laporan yang memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama kegiatan operasional berlangsung. Unsur Unsur Laporan Operasional antara lain :

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus masuk yang melekat dari suatu aset dan meningkatnya nilai aset yang menjadi partisipasi hak.

Jenis-jenis pendapatan antara lain :

a) Pendapatan Zakat

Pendapatan zakat adalah pendapatan yang berasal dari penerimaam dan penyaluran zakat yang tidak keluar dari asnaf 8.

¹³Mhd.Syahman Sitompul, et Al., “ *Akuntansi Masjid* ”, (Medan:Febi UIN-SU Press,2015),h. 68-69

Dimana penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan realitas keberadaan mustahil.

b) Pendapatan Infaq

Pendapatan infaq adalah pendapatan Masjid atas jasa yang diberikan Masjid. Pendapatan infaq bersumber dari penyewaan aula Masjid, ambulance, parkir. Pinjaman qard bagi masyarakat dan pendapatan lain atas kegiatan usaha Masjid.

c) Pendapatan sedeqah

Pendapatan sedekah bersumber dari pemberian jamaah dan masyarakat lewat kotak amal, sumbangan rutin.

d) Pendapatan wakaf

Pendapatan wakaf bersumber dari wakaf berupa aset tetap seperti gedung, tanah, kendaraan. Maupun wakaf tidak berupa wakaf produktif, wakaf uang.¹⁴

2) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dengan membentuk arus keluar/depresiasi aset dan menurunnya nilai net aset yang menjadi partisipasi lainnya dalam operasional perusahaan. Jenis-jenis beban antara lain :

a) Beban pegawai

Beban pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai yang bertugas secara terus menerus mengurus Masjid selama periode akuntansi.

b) Beban barang

Beban barang adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan untuk membeli barang keperluan sehari-hari untuk kegiatan

¹⁴ Ibid.,h.72-73

operasional Masjid guna mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam Masjid.

c) Beban jasa

Beban jasa adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan dalam bentuk jasa untuk kegiatan operasional Masjid guna mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam Masjid.

d) Beban pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan untuk mempertahankan keutuhan aset yang dimiliki sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam Masjid.¹⁵

e) Laporan Arus Kas

Laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan di bayar oleh suatu Masjid selama periode tertentu.

f) Catatan atas laporan keuangan Masjid

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.¹⁶

C. Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi

Sejumlah prinsip akuntansi dasar telah dikembangkan melalui penggunaan umum. Semua prinsip tersebut membentuk dasar bagi akuntansi modern saat ini. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Akrual (*Accrual Principle*)

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya tanpa melihat apakah teransaksi pembayaran atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum.

2. *Monetary Unit* (Unit Moneter)

Pengukuran setiap transaksi adalah dalam bentuk nilai atau unit uang.

¹⁵ Ibid.,h.85-86

¹⁶Ibid.,h.68

3. Prinsip Entitas Ekonomi (*Economic Entity Principle*)
Dalam prinsip ini kita harus memisahkan transaksi bisnis dari milik pribadi dengan bisnis lain yang kita lakukan.
4. *Going Concern Principle*
Dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan terus beroperasi di masa yang akan datang. Jika perusahaan dianggap tidak mampu melanjutkan usahanya harus diungkapkan oleh akuntan.
5. Periode waktu (*Time Period*)
Laporan keuangan menyajikan informasi suatu waktu atau periode tertentu.
6. Pengukuran (*Measurement*)
Akuntansi adalah sebagai media pengukuran sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Akuntansi harus mengukur jelas transaksi.

Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis.¹⁷

Hasil laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen dalam suatu perusahaan.¹⁸

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat melihat hubungan antara angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk melihat kondisi keuangan yang lebih dalam sehingga dapat menghasilkan

¹⁷Syafrida Hani, *Teknik Analisa Laporan Keuangan*, (Medan: UMSU PRESS, 2015), h. 11.

¹⁸*Ibid.*, h. 12.

estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

D. Pengelolaan Keuangan Masjid

Pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada Pembina. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, pertanggungjawaban secara vertikal juga berarti pertanggungjawaban kepada Tuhan, meskipun tidak ada dalam bentuk materi maupun fisik. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kedua pola pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas keuangannya. Uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik.

Beberapa kegiatan penggalan dana dapat dilakukan, diantaranya:

- a. Donatur tetap, yaitu sumbangan dari jama'ah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infaq.
- b. Donatur tidak tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor atau simpatisan.
- c. Donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama'ah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidental. Hal ini dilakukan dengan menyediakan Kotak Amal maupun penggalangan dana masyarakat.
- d. Usaha ekonomi, yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang jasa dan perdagangan.

Adapun lalu lintas keuangan masjid dapat dilihat dari beberapa kegiatan, seperti:

- a. Pengumpulan

Pengumpulan dana dikoordinasi oleh Pengurus Bidang Dana dan Perlengkapan yang berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk keseluruhan aktivitas. Pengurus melakukan beberapa aktivitas penggalangan dana, di antaranya mengajukan proposal, membuat kotak amal, aktivitas jasa dan ekonomi, dan lain sebagainya.

b. Pemasukan dan pengeluaran

Dana yang telah dikumpulkan Bidang Dana dan Perlengkapan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara dengan diketahui Ketua Umum. Hal ini dilakukan dengan mekanisme Form Penyerahan Dana. Oleh Bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam Kas Keuangan Kenaziran Masjid atau Rekening Bank. Apabila disimpan di Bank, sebaiknya menggunakan Bank Syari'ah dengan Ketua Umum dan atau Bendahara sebagai penandatanganan *cheque* atau pengambilan cash.

Untuk pengeluaran dana perlu diperhatikan adanya kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. Bidang yang bersangkutan mengajukan permohonan dana kepada Ketua Umum dengan mengisi Form Permintaan Uang Muka. Apabila disetujui, selanjutnya Bendahara mengeluarkan dana sesuai yang dimintakan. Demikian pula, penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan melampirkan Laporan Keuangan, atau dipertanggungjawabkan dengan mengisi Form Pertanggungjawaban Uang Muka.

c. Pengawasan

Aktivitas pengumpulan dana oleh Bidang Dana dan Perlengkapan maupun pengelolaan dana oleh Bendahara perlu dilakukan pengontrolan. Hal ini dilakukan antara lain melalui:

- 1) Lembar bukti. Beberapa lembar bukti yang bisa digunakan antara lain: kwitansi, nota, deklarasi, kupon dan lain sebagainya.
- 2) Lembar Informasi. Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana tiap bulan disampaikan oleh Bidang Dana dan Perlengkapan maupun Bendahara.
- 3) Papan pengumuman. Informasi keuangan Kenaziran Masjid yang ditempelkan pada papan pengumuman.

- 4) Laporan rutin. Pengurus Bidang Dana dan Perlengkapan maupun Bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum Rapat Umum maupun Laporan Tahunan Pengurus. Juga disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada saat Musyawarah Jama'ah.
- 5) Forum/Lembaga pengawas. Beberapa forum atau lembaga yang bisa melakukan pengawasan secara langsung adalah:
 - a) Rapat Umum.
 - b) Rapat Pleno.
 - c) Majelis Syura.
 - d) Musyawarah Jama'ah.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sub bagian dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah sistim administrasi yang mengatur keuangan organisasi. Uang yang masuk dan keluar harus tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Penganggaran.
- b. Pembayaran jasa.
- c. Laporan keuangan.
- d. Dana dan Bank.

Apabila di suatu daerah belum ada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), Ta'mir Masjid dapat menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah dari para muzakki atau dermawan kepada para mustahiq atau dlu'afa. Dalam hal ini, Pengurus bertindak selaku 'amil zakat. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah biasanya semarak di bulan Ramadhan, namun tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan lain, khususnya untuk infaq dan shadaqah.

Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan dilaporkan kepada para muzakki atau dermawan penyumbanganya serta diumumkan kepada jama'ah. Hal ini untuk menghindari fitnah atau rumor yang berkembang di masyarakat adanya penyelewengan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh Pengurus.

Beberapa kegiatan lain yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah:

- a. Sumbangan ekonomi.
- b. Bimbingan dan penyuluhan.
- c. Ukhuwah islamiyah.
- d. Bakti sosial.
- e. Rekreasi.

E. Akuntabilitas Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dalam konsep akuntabilitas perspektif akuntansi syariah, yaitu kontribusi kepada Allah SWT dan kontribusi kepada manusia¹⁹.

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Selanjutnya, akuntabilitas keuangan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya, terutama pada Allah SWT.

F. PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba²⁰

Organisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari

¹⁹ Novendi Arkham Muhtadi, *Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen)*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2017. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/590/448>. Diunduh 20 Oktober 2018, h. 80-81.

²⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 45 (Revisi 2011) : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. (Jakarta : IAI, 2011), h. 1-10

kontribusi, perolehan dana dari endowment atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang:

PSAK Nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Pernyataan dalam PSAK 45 ini menetapkan informasi-informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. selanjutnya pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan Pernyataan ini mengacu mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Sifat Pembatasan Dana Menurut PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut:

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Komponen Laporan Keuangan Menurut PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan,
2. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
3. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal
4. Laporan Aktivitas,

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
2. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping itu, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

Laporan Arus Kas, adapun tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, dengan tambahan berikut ini:

1. Aktivitas pendanaan:
 - a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 - b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).
 - c. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba sesuai dengan karakteristik :

- a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan kepemilikan tersebut tidak mencerminkan mencerminkan proporsi pembagian sumber daya

entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

G. Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid

Birokrasi modern menuntut adanya akuntabilitas sebagai salah satu pra-syarat pemerintahan yang demokratis. Setidaknya ada tiga tuntutan dari pemerintahan modern, yakni; “transparansi, partisipasi dan akuntabilitas”. pada tulisan ini saya ingin menyoroti konsep akuntabilitas pemerintahan yang dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan masjid. Sebagian masjid di Indonesia memiliki laporan kegiatan yang ditulis di papan pengumuman. Tetapi yang seluruh masjid di Indonesia memiliki pola yang sama dalam hal pertanggungjawaban keuangan setiap pekan, yakni setiap hari jumat.²¹

Semua masjid mengumumkan laporan keuangan mereka setiap pekan. Biasanya pengurus masjid melaporkan aktivitas selama sepekan, kemudian penggunaan belanja rutin, dan jenis-jenis pengeluaran. Setelah semua tetek bengek pengeluaran dibacakan, mulai dari recehan hingga jutaan, maka pengurus melaporkan dana dan fasilitas yang masuk selama sepekan. Sumbangan-sumbangan dalam berbagai bentuk dibacakan, nama-nama penyumbang disebutkan bila ia penyumbang dalam jumlah besar. Atau jika penyumbang tidak mau disebutkan namanya, maka ditulis secara anonym dengan nama “hamba Allah”. Kegiatan ini berlaku secara rutin di semua masjid. Sehingga publik atau masyarakat sekitar masjid yang ingin mengetahui sirkulasi keuangan masjid, maka ia dengan gampang memperolehnya dari laporan rutin pekanan tersebut,

Kegiatan laporan kegiatan tersebut apabila dikonstruksi ke dalam kegiatan pemerintahan modern maka akuntabilitas ini sudah dituangkan dalam bentuk laporan resmi keuangan pemerintahan yang dilakukan setiap tahun yang bentuknya adalah “laporan keuangan pemerintah”.

Dasar hukum dari akuntabilitas ini misalnya dalam dilihat dalam Bab VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD mulai dari Pasal Pasal 30 sampai Pasal 33 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga mengatur mengenai laporan keuangan

²¹Fajlurrahman Jurdi. Akuntabilitas Keuangan Masjid. h. 1. 2017 dalam journal

Negara. Di dalam Pasal 6 mengatur mengenai tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.

Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pengelolaan keuangan khususnya organisasi masjid tidak bisa lepas dari peran para pelaku akuntansi itu sendiri. Manusia sebagai pelaku akuntansi memiliki peran mutlak untuk menjadikan sebuah laporan keuangan itu benar-benar jujur atau sebaliknya, terdapat kecurangan. Keduanya merupakan sebuah pilihan, keduanya sama-sama memiliki peluang untuk terjadi. Bahkan, tak jarang memunculkan godaan bagi para pelaku akuntansi hingga terjadi dilema batin ketika mulai ada niatan untuk berbuat kecurangan.²²

Apabila laporan keuangan dilakukan seperti laporan keuangan masjid, maka dapat dipastikan akuntabilitasnya tidak diragukan, karena kontrol publik akan berjalan maksimal. Kemungkinan *disclaimer* atas laporan keuangan Negara juga bisa diminimalisasi. Dengan merujuk pada laporan keuangan masjid sebagai model laporan keuangan pemerintah, maka celah untuk memanipulasi laporan dan kemungkinan tindakan koruptif juga dapat dikurangi.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penulis yaitu:

1. Desy Andikawati dalam penelitiannya dengan judul “*Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus pada Lembaga Masjid Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda)*”, melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 dalam laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Tetapi setelah melakukan rekonstruksi laporan keuangan sederhana lebih cocok untuk di terapkan atau di sesuaikan dengan PSAK 109 di banding dengan PSAK 45 karena akun-akun yang terdapat di laporan keuangan sederhana masjid hampir sama dengan akun-akun PSAK 109.

²²Ruci Rahayu, Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. 2014. dalam e-journal. h. 4.

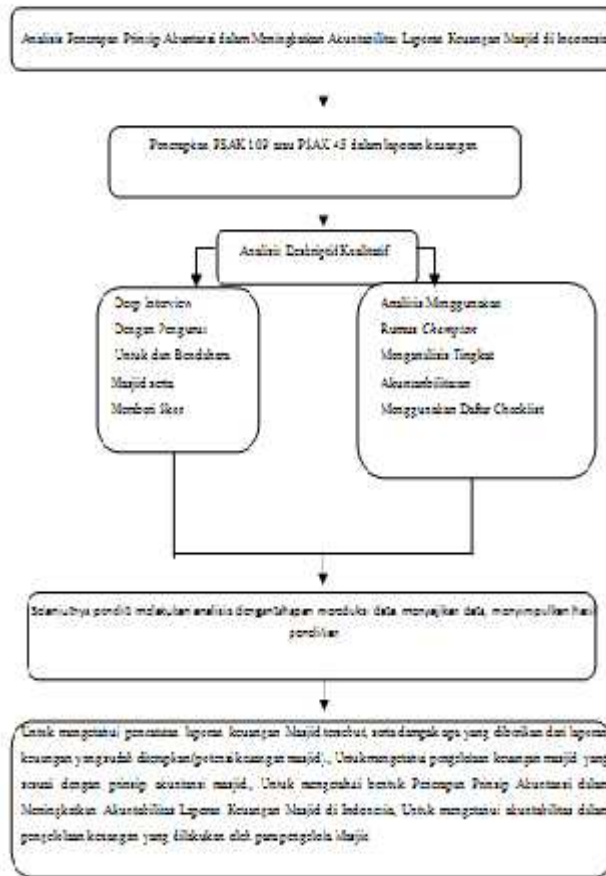
2. Roby Hanafi dalam penelitiannya dengan judul *“Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Nurussyifa’ Surakarta)”* melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya praktek akuntansi yang digunakan di Masjid Nurussyifa’ sangat sederhana namun para pengurus sangat menjaga amanah yang telah diberikan para jamaah untuk mengelola keuangan masjid dengan baik kepada para pengurus. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian dan pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.
3. Jennifer Seftiany dalam penelitiannya yang berjudul *“Pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan mesjid (penelitian pada 36 mesjid besar di kota bandung)”* melalui pendekatan metode deskriptif asosiatif menyebutkan dalam penelitiannya Uji hipotesis penelitian, penulis melakukannya dengan uji t untuk masing-masing variabel x_1 dan x_2 , dan y . Dari hasil uji t hitung akuntabilitas terhadap manajemen keuangan masjid t hitung (4,199) lebih besar dari t tabel (2,035), transparansi t hitung (4,818) lebih besar dari t tabel (2,035). Maka dari hasil uji hipotesis tersebut penulis menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima (H_0 ditolak, H_a diterima) artinya terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap manajemen keuangan masjid dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid. Untuk mencari besarnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid secara simultan penulis melakukannya dengan uji f dengan koefisien determinasi (K_d). Dari hasil uji F hitung $>$ F tabel yaitu (33,790) lebih besar dari F tabel (3,285). Hasil perhitungan tersebut bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dengan nilai 67,2% sedangkan sisanya

32,8% adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh peneliti, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin melihat seberapa besar kadar akuntabilitas dalam laporan keuangan masjid yang dibuat oleh pengelola masjid, melihat potensi keuangan masjid, serta penerapan prinsip akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid di Indonesia dengan menggunakan metode *champion*.

H. Alur Penelitian

Berdasarkan penjelasan secara teori diatas, adapun alur penelitian dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar. 2.1
Alur Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat kualitatif komparatif yang merupakan penelitian lapangan. Metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dengan kahasannya sendiri.

Pendekatan kualitatif merujuk dan menekankan pada proses dan berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur, dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang erat antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan.²³ Sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti dapat menganalisis penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan masjid. Sedangkan analisis komparatif bertujuan untuk membandingkan antara penyajian laporan keuangan masjid di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Penelitian dilakukan di 18 masjid di Indonesia, adapun nama-nama masjid tersebut yaitu:

No	Nama Masjid
1	Masjid Raya Makassar
2	Masjid Istiqlal Jakarta
3	Masjid Jogokarian Yogyakarta
4	Masjid Pogung Dalangan
5	Masjid Al-Jihad Medan
6	Masjid Ar-Rahman Medan Marelan
7	Masjid Pogung Raya Yogyakarta
8	Masjid Al-Markaz Makassar
9	Masjid Raya Binjai
10	Masjid Agung Binjai
11	Masjid Baiturrahim BTN Skyline Jaya Pura

²³Yusup Pawit M, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, (Jakarta: kencana,2007), h.23

12	Masjid raya Stabat
13	Masjid Jamik Birugo Bukit Tinggi
14	Masjid At-Taqwa Batu Bara
15	Masjid Baitussyakur Batam
16	Masjid Darussalam KDA Batam Kuta- Kepri
17	Masjid Baitul Muqarrabin Aceh
18	Masjid Baiturrahman Banda Aceh

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (*organisasi*). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Didalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.²⁴

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah BKM (*Badan Kemakmuran Masjid*), dalam hal ini ketua, sekretaris dan bendahara yang dapat memberikan informasi respresentatif dan mempunyai akses dan pengaruh terhadap semua kegiatan operasional masjid. Adapun objek dalam penelitian ini adalah 13 masjid yang ada di Indonesia.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara yang hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam.

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Dalam pengumpulan data ini objek yang akan diwawancarai yaitu *ketua* masjid dan bendahara masjid. Dalam hal ini ketua masjid akan di wawancarai mengenai pengelolaan masjid, dan *bendahara* masjid akan di wawancarai mengenai bentuk laporan keuangan masjid dan bagaimana masjid tersebut mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid tersebut kepada masyarakat.

b. Observasi

²⁴Ruslan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruszz Media, 2014), h.98.

Metode observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Pengambilan data dengan metode ini menggunakan mata tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi atau bantuan alat-alat standar lain untuk keperluan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan realita yang terjadi dalam pengelolaan dana masjid yang menjadi objek penelitian, sebagai data pendukung peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya pada saat melakukan observasi peneliti menggunakan daftar *checklist* dengan berbagai pernyataan dan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian melalui pengamatan dan wawancara.

Selanjutnya menggunakan rumus champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban “YA”, kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Prinsip Akuntansi Laporan Keuangan Masjid dalam Meningkatkan Akuntabilitas}}{\text{Jumlah jawaban "YA"}} \times 100\% = \frac{\text{Jumlah seluruh jawaban responden}}{\text{Jumlah seluruh jawaban responden}}$$

Rumus champion digunakan karena terdapat kriteria jawaban “YA” dan “TIDAK”, sehingga jawaban kuesioner yang diperoleh dari para responden tidak sama. Dengan kata lain, hasil dari akuntabilitas yang ada, tidak pasti apakah jawaban itu “YA” atau “TIDAK”.

Dari hasil perhitungan tersebut, penulis menggunakan klasifikasi menurut *Basic Statistic for School Research* oleh Dean J. Champion, dengan interval klasifikasi sebagai berikut:

- 1) 0% - 25%. *No association or low association*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini tidak mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.
- 2) 26% - 50%. *Moderately low association*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini kurang mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.
- 3) 51% - 75%. *Moderately high association*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini cukup mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.

- 4) 76% - 100%. *High association up to prefect assocation*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini sangat mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen atau catatan yang terdapat di masjid yang ada hubungannya dengan penelitian ini, misalnya laporan keuangan, struktur organisasi dalam penyusunan laporan keuangan, serta data dokumentasi penunjang lainnya.²⁵

d. Analisis Isi

Analisis isi digunakan berkenaan dengan permasalahan, yaitu:

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang berdokumentasi.
2. Memberikan unsur teori tertentu mengenai data tersebut, karena bahasa yang dipergunakan oleh subyek yang diteliti sangat sulit dipahami.
3. Si peneliti memiliki kemampuan teknis karena sering kali volume materi melebihi kemampuan peneliti untuk menanganinya.²⁶

E. Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat Deskriptif Kualitatif yang penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan data apa adanya sesuai keperluan data dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan bersifat manual. Jadi dalam analisis data ini peneliti akan mendepelintikan bagaimana penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan masjid. Dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data

²⁵Umar, Husein., *Desain Penelitian : MSDM dan Perilaku Karyawan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 20.

²⁶ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 127

yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Kemudian tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif dengan masalah dan pertanyaan penelitian. Hal ini disebabkan oleh penelitian ini yang akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah dan pertanyaan penelitian/ informasi masalah. Tujuan ini juga menentukan bagaimana Anda mengolah atau menganalisis hasil penelitian yaitu dengan membuat analisis.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.
- b. Mengklarifikasikan materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.
- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila ada kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.

Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian secara logis serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.²⁷

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009), Cet.IX., h. 244.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masjid

1. Masjid Al Jihad

a. Sejarah

Masjid al-jihad merupakan masjid yang didirikan pada tahun 1958 di Jalan Abdullah Lubis Medan dengan luas 8.677m² dengan daya tampung 2000 jamaah oleh 17 orang pendiri yayasan. Pada tahun 2012 terjadi sengketa tanah antara pemerintah dengan FKJMAJ (forum komuniiasi jemaah masjid al Jihad). Pasalnya tanah atau lahan tempat berdirinya bangunan masjid di kecamatan Medan Baru, kota Medan, ternyata masih milik pemerintah kota Medan berdasarkan sertifikat hak pakai no 30 atas nama Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru.

Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh departemen dalam negeri dan ditanda tangani walikota/ KDh Medan/Kepala Sub Direktorat Agraria up kepala seksi pendaftaran tanah, Ahmad Husein Hasibuan tertanggal 20 November 1976. Dalam sertifikat terdapat catatan tentang peralihan hak, hak-hak lain, penghapusannya (perubahan) yang bunyinya : “hak pakai tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri/ Direktur Jenderal Agraria.“ Forum Komunikasi Jamaah Masjid Al-Jihad Medan Baru menilai dengan adanya bukti otentik merupakan sertifikat hak milik tersebut semakin menguat dugaan adanya penyalagunaan Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru.

Upaya FKJMAJ untuk terus mencari keberadaan terhadap sejarah Masjid Al-Jihad seolah mendapat kemudahan dari Allah SWT guna mengungkapkan semua hal yang terjadi. Ada sejumlah pertanyaan yang di ajukan FKJMAJ Medan Baru kepada Notaris Aslely Asrol mengenai apakah status tanah beserta Masjid Al- Jihad Medan Baru saat ini merupakan hak milik pendiri yayasan yang berjumlah 17 orang dan di jadikan wakaf pendiri. Dan apakah uang infaq sedekah Jamaah Masjid tidak diperhitungkan sejak Masjid Al-Jihad digunakan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Medan umumnya. FKJMAJ berkesimpulan bahwa akta Nomor 9 Tanggal 29 Juli 2013 tentang pendirian Yayasan Masjid Al-Jihad adalah catat hukum dan melanggar Undang-Undang No 16 Tahun 2001 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “ yayasan didirikan oleh

satu orang atau lebih guna memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal “. Dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan 62 UU tentang Yayasan. Selain itu FKJMAJ Medan Baru juga menduga adanya kepalsuan *Intelektual* yang terjadi dalam para penghadap memberikan keterangan tidak benar dalam akte hal ini dibuktikan dengan adanya perkataan semata-mata untuk memenuhi ketentuan UU yayasan untuk mendapatkan status badan hukum.

Pemberian keterangan yang tidak benar tersebut dinilai memenuhi unsur-unsur pasal 26 ayat (1) KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1e yakni “ secara bersama-sama menyeluruh menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik. Sebelumnya FKJMAJ Medan Baru juga sudah melakukan audiensi ke Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada 4 september 2017. Setelah itu BWI Sumut mengadakan pertemuan dengan pengurus Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru pada rabu 20 Desember 2017 di kantor BWI Sumut/ Gedung King Abdul Aziz Asrama Haji Medan yang dihadiri ketua umum Yayasan Masjid Al-Jihad Prof.Dr HM. Asy’Ad Msi dan pengurus lainnya.

Selanjutnya BWI Sumut melayangkan surat kepada FKJMAJ Medan Baru yang ditandatangani ketua BWI Sumut Prof.Dr HM Yasir Nasution tertanggal 29 Desember 2017 tentang penjelasan pengurus Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru. Dalam surat yang juga ditembuskan ke kakanmenag kota Medan, Ketua MUI kota Medan, dan kepala kantor BPN kota Medan itu disebutkan, bahwa Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru didirikan pada 29 juli 2013 di hadapan Notaris Aslely Asrol SH dengan Akte Notaris Nomor 9 dengan pendiri sebanyak 17 orang dan merupakan kelanjutan yayasan yang didirikan berdasarkan Akte Wakaf (*Stichting*) tanggal 29 juli 1954 Nomor 171 yang dibuat di hadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan.

Namun karena para pendiri awal sesuai (*Stichting*) tersebut umumnya telah meninggal dunia dan disisi lain terjadi beberapa kali perubahan UU tentang Yayasan, maka untuk melanjutkan pengelolaan dan mengamankan serta mengembangkan aset wakaf Masjid Al-jihad Medan baru, didirikanlah Yayasan dengan nama yang sama berdasarkan Akte Nomor 9 tanggal 29 juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Aslely Asrol SH dan disahkan sebagai Badan Hukum oleh menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-05187.50.10.2014 tanggal 24 Agustus 2014. Tentang kekayaan awal yayasan yang tertera pada pasal 5 Akte Yayasan sebesar Rp25 miliar disebutkan berasal dari kekayaan pendiri yang 63 dipisahkan.

Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Jihad menjelaskan bahwa angka itu adalah akumulasi dari perkiraan harga tanah dan bangunan untuk memenuhi ketentuan UU Yayasan guna mendapatkan status badan hukum, bukan ,kekayaan yang berasal dari masing-masing pendiri Yayasan. Teganya, dana sebesar tersebut adalah kekayaan Masjid Al-jihad Medan Baru dengan kata lain adalah Wakaf.

Namun ketua BWI Sumut Yasir juga menyarankan kepada Pengurus Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru agar membentuk badan kemakmuran Masjid (BKM) dan sedapat mungkin jamaah yang memiliki kemampuan pada bidangnya diikutsertakan dalam BKM dimaksud termasuk dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang ada dalam binaan Yayasan, sebagai Nazir Wakaf Masjid Al-Jihad. Kepada pengurus Yayasan juga disampaikan agar sertifikat (tanda bukti hak tanah) Masjid Al-Jihad yang ada saat ini berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 yang apabila suatu saat pemerintah berkehendak, bisa saja dicabut atau dialihkan. Untuk itu agar lebih aman, Yayasan sebagai nazir segera mengurus Sertifikat tersebut menjadi Sertifikat Wakaf agar tidak bisa dialihkan oleh siapapun. Fasilitas yang tersedia di Yayasan Masjid Al-Jihad adalah parkir, gudang, AC, Sound System dan Multimedia, genset, Toilet, Tempat Wudhu, dan Sarana Ibadah. Adapun kegiatan yang di selenggarakan oleh pihak Yayasan adalah pengajian rutin, dakwah islam/tabliq akbar, dan kegiatan hari besar islam.

b. Susunan Pengurus Yayasan Masjid Al-Jihad Medan

Adapaun Susunan Pengurus Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Periode 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum : Prof.Ir As'ad, M.Si
- 2) Ketua 1 : Adri Wibowo, ST
- 3) Ketua 2 : Abdul kamal KH
- 4) Sekertaris Umum : Shaiful Ishlah
- 5) Bendahara Umum : T.Syahputra, SE
- 6) Bidang Dakwah : Drs.H.Idris Zainal
- 7) Wakil Sek.Umum : Said Irfan, Sp
- 8) Ketua Keamanan : Dr.H. Abdul Kadir, Sp.B
- 9) Koordinator Kebersihan : M.Syarif
- 10) Koordinator Parkir : M.Syahreza Hady Umri Ginting
- 11) Koordinator Peralatan Multimedia : M.Hatta,SE 64.

c. Proses Pengumpulan Dana Infaq

Penghimpunan dana yang dilakukan Yayasan Masjid Al-Jihad yaitu dengan Infaq penitipan alas kaki, Infaq parkir kendaraan roda dua (Sepeda Motor) dan Infaq parkir kendaraan roda empat (Mobil). Proses pengolahan dana infaq di Yayasan Masjid Al-Jihad menggunakan proses Tabulasi. Proses Tabulasi adalah proses penempatan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan. Tabel yang dibuat mampu meringkas semua data. Dimana setiap ba'da Isya semua petugas dan kotak infaq parkir dan penitipan alas kaki dikumpulkan dan di hitung. Kemudian dicatat berdasarkan golongan masing-masing, kemudian di tulis kedalam tabel tabulasi. Setelah proses tabulasi dilakukan, jumlah dana infaq di satukan dan dilaporkan ke dalam buku kas.

d. Proses Penyaluran Dana Infaq

Penyaluran dana infaq Yayasan Masjid Al-Jihad digolongkan menjadi dua yaitu primer (bersifat kemanusiaan) dan sekunder (Bangunan).

- 1) Primer (Sifat kemanusiaan), Yang dimaksud dengan primer adalah bantuan yang diprioritaskan kepada manusia seperti :
 - a) Menolong sesama manusia yang mendapatkan musibah.
 - b) Membantu kaum Muallaf untuk menuntut ilmu islam secara mendalam.
 - c) Memfasilitasi masyarakat umum dalam menuntut ilmu.
 - d) Melayani kaum Musafir yang singgah di Yayasan Masjid Al-Jihad
 - e) Memberikan bantuan kepada panti asuhan yang membutuhkan.
- 2) Sekunder (Sifat keagamaan), Yang dimaksud dengan sekunder adalah bantuan yang diprioritaskan untuk mengembangkan sarana/prasarana dalam kegiatan keagamaan seperti :
 - a) Bantuan renovasi Masjid dan Panti Asuhan yang membutuhkan 65
 - b) Pembebasan sengketa lahan Masjid yang bermasalah
 - c) Menyediakan tempat untuk kegiatan keagamaan.

2. Masjid Raya Binjai

a. Sejarah

Menurut sejarah, Masjid Raya Binjai pertama kali dibangun oleh Sultan Langkat Tuanku Sultan Haji Muusa Al Khalid Al-Mahadiah Muazzam Shah (Tengku Ngah) Bin Raja Ahmad yang

menjabat periode 1840-1893. Peletakan batu pertamanya pada tahun 1887. Pada masa Tuanku Sultan Haji Musa pembangunan masjid belum rampung, dan setelah mangkatnya Tuanku Sultan haji Musa, kesultanan diperintah oleh putranya Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah (1893-1927). Masjid ini selesai dan diresmikan oleh Tuanku Sultan Abdul Aziz lebih kurang tahun 1894. Pada tahun 1924 renovasi dilakukan untuk merubah kubah yang ada di masjid dan sampai sekarang ini kubah tersebut tidak direnovasi lagi. Pada tahun 1990 an renovasi dilakukan terhadap lantai teras masjid begitu pula dengan pembangunan menaranya.

Merujuk kepada data Kemenag, masjid ini sudah memiliki nomor ID 01.5.02.30.02.000003 berdiri di atas tanah wakaf seluas 1000 meter persegi dan berdaya tampung 1500 jamaah. sertifikat tanah masjid ini disyahkan oleh Badan Pertahanan Kota (madya) Binjai pada tanggal 2 Januari 1992 dengan status wakaf. Bertindak sebagai Nadzir wakaf adalah Drs. R.J. hadisiswoyo, Drs. Sarakal Ahmad Siregal dan H. Syamsudin Amri. Lahan masjid berbatasan dengan jalan Jauriat Jaksa disebelah utara dan Jalan Masjid disebelah timur, jalan Pembangunan disisi selatan dan lahan penduduk disisi barat.

b. Sosial

Disebutkan juga bahwa masjid raya Binjai memiliki beragam aktivitas termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan seperti TPA, Madrasah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Menyelenggarakan dakwah islam/Tabligh Akbar, menyelenggarakan kegiatan hari besar Islam, menyelenggarakan ibadah sholat fardhu.

3. Masjid Agung Binjai

a. Sejarah

Masjid Agung kota Binjai terletak di Jalan Olahraga Kelurahan Timbang Langkat kecamatan Binjai Timur, kota Binjai. Masjid ini sangat mirip dengan masjid di Madinah, Arab Saudi. Lokasi masjid sangat strategis yaitu memiliki jembatan penyeberangan menuju Jalan Soekarno Hatta depan SMPN 3 Binjai. Selain itu akses masuk melalui jembatan penyeberangan , masjid Agung membuka akses ke Binjai Mall. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Binjai adalah HM Yusuf SH, M. Hum. Sumber dana

masjid berasal dari infaq jamaah yang mencapai Rp 300 juta setiap tahun.

4. Masjid Jogo Kariyan Yogyakarta

a. Sejarah

Sebelum Tahun 1967, dikampung Jogokariyan belum ada masjid. Kegiatan keagamaan dan dakwah berpusat di sebuah langgar kecil di pojok kampung terletak di RT 42 RW 11 (sekarang menjadi rumah keluarga Bp. Drs. Sugeng Dahlan, selatan rumah Almarhum Bp. H. Basyir Widyahadi). Langgar berukuran 3×4 meter persgi dengan lantai berundak tinggi ini Ramadhan saja tidak pernah terisi. Maklum masyarakat Jogokariyan pada saat itu umumnya kalangan “ABANGAN” karena kultur Abdi dalam prajurit keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang lebih *ngugemi* “Tradisi Kejawen” dari pada kultur pada kultur keIslaman. Kampung Jogokariyan yang dibuka sejak masa HB IV, setelah penduduk ndalem Beteng Baluwerti Keraton telah sesak, makan Bergodo-Bergodo prajurit Kesatuan dipindah keluar beteng bersama keluarganya dan Abdi Dalem Prajurit dari Kesatuan “Jogokariyo” dipindah di selatan benteng, di utara Panggung Krapyak atau Kandang Menjangan, sehingga tempat tinggal/Palungguhan Prajurit ini sesuai dengan Toponemnya dikenal dengan nama “Kampung Jogokariyan”. Pada masa HB ke VIII ada perubahan peran prajurit di Keraton Ngayogyakarta yang semula adalah Prajurit Perang hanya menjadi prajurit upacara dan dipersempit yang semula jumlahnya 750 orang hanya menjadi 75 orang saja. Maka para abdi dalam prajurit banyak yang kehilangan jabatan dan pekerjaan.

Kebiasaan hidup mapan sebagai Abdi Dalem dengan senang judi, mabuk bahkan nyeret (Nyandu) harus berubah menjadi petani karena tidak lagi menerima gaji, tetapi diberi tanah Palungguh (sawah) dan Pekarangan, tidak sedikit yang tidak bisa menyesuaikan diri sehingga tanah pekarangan banyak yang jatuh dijual kepada Pengusaha Batik dan Tenun dari Kampung Jogokariyan. Terjadilah perubahan sosial ekonomi yang cukup membuat syok warga. Kampung Jogokariyan mulai berubah jadi kampung batik dan tenun, generasi anak-anak Abdi Dalem terpaksa bekerja jadi buruh di pabrik-pabrik Tenun dan Batik. Nasa-masa kejayaan Batik dan Tenun, merupakan masa-masa buram bagi keturunan Abdi Dalem prajurit Jogokariyan yang tidak bisa menyesuaikan diri, mereka penduduk asli yang sudah menjadi miskin ditengah kemakmuran pendatang, padahal mereka punya gelar bangsawan, Raden atau Raden Mas. Kesenjangan

sosial ekonomi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sentimen kelas buruh dan majikan.

Maka gerakan PKI disambut antusias oleh warga Jogokariyan yang termarginalisasi ini, sehingga di Jogokariyan menjadi basis PKI yang didominasi warga miskin dan buruh. Para juragan yang berasal dari “Abangan” aktif di PNI dan beberapa pendatang dari Karangakajen menjadi pendukung Masyumi (Jumlahnya minoritas). Pada saat meletus G30S PKI 1965, banyak warga yang dicituk (ditangkap dan dipenjara) sebagai tahanan politik. *Alhamdulillah* di masa-masa kritis tersebut Masjid Jogokariyan dibangun dan menjadi alat perekat untuk melakukan perubahan sosial menjadi masyarakat Jogokariyan yang berkultur Islam. Masjid Jogokariyan telah benar-benar melaksanakan fungsi sebagai agen perubahan. Jogokariyan yang dulu “Abangan” Komunis kini mejadi masyarakat Islami melalui dakwah berbasis Masjid.

Sejak masjid dibangun, sudah banyak usulan “Nama” terhadap masjid yang tengah dalam proses pembangunan yang dimulai pada tanggal 20 September 1966 di kampung Jogokariyan ini. Bahkan hingga hari ini masih selalu saja ada orang yang mempertanyakan tentang nama Masjid yang terletak di tengah-tengah kampung ini. Tetapi para Pendiri dan Perintis Dakwah di Jogokariyan telah sepakat memberi nama Masjid ini dengan nama “Masjid Jogokariyan” Proses Pembangunan Masjid Jogokariyan Masjid Jogokariyan dimulai dari ide oleh H.Jazuri seorang Pengusaha batik dari Karangakajen yang memiliki rumah di kampung Jogokariyan, ide ini dibicarakan dengan beberapa tokoh ummat dan masyarakat seperti Bpk.Zarkoni (Waktu itu belum Haji), Bpk.Abdulmanan, H.Amin Said (satu-satunya warga yang sudah haji tahun 1957), Bpk.Hadits Hadi Sutarno, KRT Widyodiningrat, Ibu Margono dll.

Tetapi di Jogokariyan tida ada tanah wakaf, maka mereka membentuk panitia dan kemudian mengumpulkan dana untuk membeli tanah dimana diatasnya akan dibangun Masjid Jogokariyan. *Alhamdulillah* atas bantuan para pengusaha Batik dan Tenun yang tergabung dalam koperasi Batik “Karang Tunggal” dan Koperasi tenun “TRI JAYA” yang sebagian besar adalah pendukung dakwah Muhamadiyah dan simpatisan partai Politik Masyumi, di awal Juli 1966 telah dapat untuk membeli tanah seluas kurang lebih 600 m di selatan lokasi masjid sekarang ini. Ketika panitia hendak memulai pembangunan, ada pemikiran kalau masjid itu akan lebih baik dan monumental kalau dapat berdiri di pinggir jalan di perempatan tengah-tengah kampung.

Kebetulan saat itu, tanah yang dimaksud dimiliki oleh ahli waris Bpk.Yudo Mardoyo, yaitu Bpk.Sukadis yang baru saja pensiun dari pegawai PU di Temanggung dan ingin pulang kampung di Jogokariyan. *Alamdulillah*, ketika *dirembug* untuk tukar guling terjadi kesepakatan, tukar lokasi tanah dengan syarat panitia membangun rumah permanen untuk keluarga Bpk.Sukadis dan tanah Bpk.Sukadis menjadi lokasi pendirian Masjid Jogokariyan. *Alhamdulillah*, pada tanggal 20 September 1965, diatas tanah hasil tukar guling itu dilakukan peletakan batu pertama. Bangunan masjid berukuran 9×9 m ditambah serambi 9×6 m . Sehingga total luas bangunan adalah 15×9 m terdiri dari Ruang Utama dan Serambi. Bangunan seluas 135 m , sedangkan luas tanah adalah 660 m . Atas izin Alloh SWT, pada bulan Agustus 1967, dalam rangkaian HUT RI ke 22, Masjid Jogokariyan diresmikan oleh ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Yogyakarta. Tetapi dalam perkembangan masjid tidak lagi mencukupi luapan Jama'ah sehingga di tahun 1976 dibangunlah serambi selatan dengan atap seng dan Tahun 1978 dibangun serambi utara dengan atap Alumunium Krei. Masjid tidak lagi memiliki Halaman, bahkan jalan masuk dari depan (arah timur) tempat meletakkan sandal saja tidak ada, kemudian Takmir memutuskan membeli tanah milik Ibu Hj.Sukaminah Hadits Hadi Sutarno seluas 100 m . Sehingga pada Tahun 1978, luas tanah masjid menjadi 760 m.

Pada Tahun 1999, ketika terjadi peremajaan Pengurus Takmir, dimulai renovasi masjid Tahap I dilanjutkan Tahun 2003 Tahap ke II, masjid menjadi 3 lantai. Pada Tahun 2009, Ibu Hj.Sukaminah Hadits Hadi Sutarno, menawarkan agar tanah beliau di depan masjid dibeli dan disusul dengan keluarga Hery Wijayanto menawarkan tanah dirumahnya dibeli masjid. *Alhamdulillah* hanya dalam waktu 3 minggu Tamir bisa membeli 2 bidang tanah tersebut dengan harga 485 Juta Rupiah yang kemudian dibangun Islamic Center Masjid Jogokariyan, sehingga sekarang luas tanah masjid menjadi 1.478 m.

Setelah pembebasan tanah, Takmir segera membangun Islamic Center 3 lantai dimana di lantai 3 dibangun 11 kamar penginapan dan di lantai 2 meeting room untuk menjadi “Usaha Masjid” menuju masjid yang mandiri secara finansial.

b. Sejarah Manajemen Masjid Jogokaryan

Kenaziran masjid Jogokaryan bersama para kenaziran lainnya, masuk pada langkah strategis dan praktis. Yaitu dengan konsep Manajemen Masjid- ada di 3 langkah: Pemetaan, Pelayanan,

dan Pemberdayaan. Pada konteks Pemetaan, bisa diartikan, setiap Masjid harus memiliki peta dakwah yang jelas, wilayah kerja yang nyata, dan jama'ah yang terdata. Pendataan yang dilakukan Masjid terhadap jama'ah mencakup potensi dan kebutuhan, peluang dan tantangan, kekuatan dan kelemahan. Di masjid Jogokariyan, para Kenaziran masjid Jogokaryan, bersama Ustadz HM Jazir ASP, menginisiasi Sensus Masjid. Pendataan tahunan ini menghasilkan Data Base dan Peta Dakwah komprehensif. Data Base dan Peta Dakwah Jogokariyan tak cuma mencakup nama KK dan warga, pendapatan, pendidikan, dan lainnya, melainkan sampai pada siapa saja yang shalat dan yang belum, yang berjama'ah di Masjid dan yang tidak, yang sudah berqurban dan berzakat di Baitul Maal Masjid Jogokariyan, yang aktif mengikuti kegiatan Masjid atau belum, yang berkemampuan di bidang apa dan bekerja di mana, dan seterusnya. Detail sekali.

Peta Dakwah Jogokaryan memperlihatkan gambar kampung yang rumah-rumahnya berwarna-warni: hijau, hijau muda, kuning, dan seterusnya, hingga merah. Di tiap rumah, ada juga atribut ikonik: Ka'bah (sudah berhaji), Unta (sudah berqurban), Koin (sudah berzakat), Peci, dan lain-lain. Konfigurasi rumah sekampung itu dipakai untuk mengarahkan para Da'i yang cari rumah. Data potensi Jama'ah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Segala kebutuhan Masjid Jogokariyan yang bisa disediakan jama'ah, diorder dari jama'ah. Masjid Jogokariyan juga berkomitmen tidak membuat Unit Usaha agar tak menyakiti jama'ah yang memiliki bisnis serupa. Ukhuwah umat Islam di Jogokaryan dibangun dengan kuat. Tiap pekan, Masjid Jogokariyan menerima ratusan tamu. Konsumsi untuk para tamu, diorderkan secara bergiliran dari jama'ah yang memiliki rumah makan.

c. Gerakan Infak Selalu Tersisa Nol Rupiah

Kenaziran masjid Jogokaryan juga membuat sistem keuangan Masjid Jogokariyan yang berbeda dari masjid lainnya. Jika ada Masjid mengumumkan dengan bangga bahwa saldo infaknya jutaan, maka Masjid Jogokariyan selalu berupaya keras agar di tiap pengumuman, saldo infak sebisa mungkin NOL! Infak itu ditunggu pahalanya untuk menjadi 'amal shalih, bukan untuk disimpan di rekening Bank. Meskipun pada aplikasinya tidak mungkin saldo selalu Nol, tapi motto ini adalah tekad kami untuk menyegerakan penyaluran infaq. Kenaziran masjid Jogokaryan memiliki konsep yang sangat humanis dan memikirkan masalah keumatan sehari-hari. Pengumuman infak

jutaan akan sangat menyakitkan, ketika tetangga Masjid ada yang tak bisa ke Rumah Sakit sebab tak punya biaya, atau tak bisa sekolah. Kenaziran Masjid Jogokaryan memiliki prinsip, menyakiti jama'ah ialah tragedi da'wah. Dengan pengumuman saldo infak sama dengan NOL, jama'ah lebih semangat mengamankan hartanya.

d. Gerakan Jamaah Mandiri

Masjid Jogokariyan pada 2005 juga menginisiasi Gerakan Jama'ah Mandiri. Jumlah biaya setahun dihitung, dibagi 52. Sehingga ketemu biaya setiap pekan. Kemudian, Dibagi lagi dengan kapasitas Masjid; ketemu biaya per-tempat shalat. Lalu disosialisasikan. Jama'ah diberitahu bahwa jika dalam sepekan mereka berinjak dalam jumlah tersebut, maka dia Jama'ah Mandiri. Jika lebih, maka dia Jama'ah Pensubsidi. Jika kurang maka dia Jama'ah Disubsidi. Gerakan Jama'ah Mandiri ini sukses menaikkan infak pekanan Masjid Jogokariyan hingga 400%. Sebab, ternyata, orang malu jika ibadah saja disubsidi. Demikianlah jika peta, data, dan pertanggungjawaban keuangannya transparan (Infak Rp.1000 pun bisa diketahui ke mana alirannya). Tanpa diminta pun, Jama'ah akan berpartisipasi. Tiap kali renovasi, Masjid Jogokariyan berupaya tak membebani jama'ah dengan proposal.

e. Makna Penting Dokumentasi

Caranya, Takmir hanya pasang spanduk, "Mohon Maaf Ibadah Anda Terganggu, Masjid Jogokariyan sedang Kami Renovasi." Nomer rekening tertera di bawah, ditambah sebuah foto dokumentasi pembangunan masjid Jogokaryan tahun 1967. Gambar dokumentasi itu adalah seorang bapak sepuh berpeci hitam, berbaju batik, dan bersarung sedang mengawasi para tukang mengaduk semen untuk Masjid Jogokariyan. Makna foto lama ini membantu dalam proses pembangunan masjid di tahun 2002/2003. Ketika Masjid Jogokariyan direnovasi besar-besaran, foto itu dibawa kepada putra si kakek dalam gambar foto. Akhirnya, foto tahun 1967 itu mendorong putra si kakek dalam foto berkenan menyumbang Rp.1 Milyar dan menjadi Tim Pembangunan Masjid Jogokariyan.

f. Program Skenario Planning

Kenaziran masjid Jogokaryan membuat Skenario planning dalam memajukan da'wah di masjid Jogokaryan. Dalam membuat Skenario Planning, Kenaziran membuat 3 periode. Periode pertama pada tahun 2000-2005. Periode kedua pada tahun 2005-2010. Dan

periode ketiga pada tahun 2010-2015. Skenario planning pada tiap periode memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi, jika ditinjau dari jenis dan jumlah program kerjanya tidak jauh berbeda. Gambaran skenario planning pada setiap periode, antara lain Jogokariyan Islami (2000-2005), dengan mengubah masyarakat dari kaum abangan menuju islami. Selain itu, pemuda yang suka mabuk di jalan, diarahkan ke masjid. Warga yang belum shalat diajak untuk shalat. Mengajak anak kecil beraktivitas di Masjid. Warga yang shalat di rumah diarahkan shalat di Masjid. Bahkan, menjadikan para pemabuk sebagai kemaanan Masjid.

Skenario planning ke dua adalah Jogokariyan Darusalam I pada rentang 2005-2010. Yaitu dengan membiasakan masyarakat untuk berkomunitas di Masjid. Jama'ah subuh menjadi 50% (10 shaf) dari Jama'ah shalat jumat. Menyejahterakan Jama'ah melalui lumbung Masjid, memperbanyak pelayanan, membuka poliklinik, memberikan bantuan beasiswa, memberikan layanan modal bantuan usaha.

Skenario Planning ke 3 adalah Jogokariyan Darusalam II (2010-2015), yaitu dengan meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat. Menuntaskan orang yang belum shalat Jama'ah. Meningkatkan Jama'ah shalat subuh menjadi 75% (14 shaf) dari Jama'ah shalat jumat. Menjadikan para (eks) pemabuk menjadi bagian dari Masjid (BBM, relawan Masjid, dll).

5. Masjid Pogung Raya

Masjid Pogung Raya merupakan sebuah masjid kampung yang terletak di Pogung Dalangan, Padukuhan Pogung Kidul, utara Fakultas Teknik UGM. Berdiri di atas tanah kas Desa Sinduadi dengan luas lahan sekitar 1200 m². Masjid Pogung Raya mulai didirikan tahun 1990 atas swadaya masyarakat dan dipimpin serta dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat Dusun Pogung Kidul serta para ustadz dan tokoh agama. Pembangunannya dikerjakan oleh seluruh warga muslim Pogung Kidul.

Dalam upaya berkhidmat kepada Islam dan kaum Muslimin, Masjid Pogung Raya selalu berupaya menghidupkan sunnah dan syiar-syiar agama Islam serta melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memberi maslahat kepada kaum muslimin khususnya warga Dusun Pogung Kidul.

6. Masjid AlMarkaz Al-Islami

1) Sejarah

Ide awal muncul Tahun 1989 saat Jenderal M. Jusuf sebagai Amirul Hajj menyampaikan gagasan untuk mendirikan masjid yang monumental di Ujung Pandang (kini Makassar) kepada sejumlah tokoh yang menunaikan ibadah haji, diantaranya Munawir Sjadzali, Edi Sudrajat, M.Jusuf Kalla dan beberapa lagi yang lain dan mendapat sambutan spontan.

Pada bulan Ramadhan 1414 H, 3 Maret 1994, Jenderal (Purnawirawan) M.Jusuf mengundang beberapa Menteri dan sejumlah pengusaha dan mengemukakan gagasan membangun pusat pengembangan peradaban Islam yang berintikan sebuah masjid dan ditempatkan di Makassar. Bukan semata-mata karena beliau berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi karena kota itu merupakan titik sentral kawasan timur Indonesia, dan masyarakatnya agamis, terlihat misalnya presentasi jemaah haji cukup besar.

Dana yang terkumpul secara spontan saat pertemuan tersebut, tidak saja berasal dari pejabat dan pengusaha muslim, tapi juga dari pengusaha non muslim seperti Prayogo Pangestu, James T.Riadi atau Harry Darmawan. Jumlahnya cukup untuk pembangunan sebuah masjid dan perlengkapannya sebagai idaman pencetusnya.

Tanggal 3 Maret 1994 M atau 20 Ramadhan 1414 H disepakati sebagai lahirnya Yayasan Islamic Center (YIC) yang dibuatkan aktanya oleh notaries Mestariyany Habie di Ujung Pandang, dengan nomor akta 18 tahun 1994.

2) Arsitektur

Masjid Haram Makkah Al Mukarramah dan Masjid Nabawi Madina Al Munawarrah disebutkan sebagai sumber ilham pembangunan Masjid dan arsitek Ir. Achamd Nu'man MEMASUKKAN UNSUR ARSITEKTUR MASJID Katangka Gowa dan rumah Bugis-Makassar pada umumnya. Masjid segi empat, meniru kuncup masjid Katangka dan rumah Bugis-Makassar itu.

Masjid ini diharapkan menjadi salah satu pusat peradaban dan pengkajian Islam di Kawasan Timur Indonesi; sekaligus mewakili kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan.

Selain berfungsi sebagai fasilitas ibadah, masjid yang akan dibangun juga menjadi sarana pendidikan, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya pada umumnya.

3) Pekerjaan Bangunan

- a) Konsultan perencana dan pengawas PT. Birano Bandung, dibawah pimpinan Ir, Achamd Nu'man.
- b) Bangunan fisik dikerjakan oleh kontraktor PT. Adhi Karya.
- c) dengan addendum 180 hari kerja; biaya waktu direncanakan Rp. 8,6 Milyar, sedang realisasinya mencapai Rp. 12 Milyar.
- d) Pembangunan ditangani dan diawasi langsung oleh H.M.Jusuf Kalla yang sekaligus Ketua Harian Yayasan Islamic Center.
- e) Pemancangan Tiang Pertama, dan batu pertama diletakkan oleh Edy Sudradjat mewakili Badan Mandiri pada 8 Mei 1994. Dan dinyatakan rampung Jum'at 12 Januari 1996.
- f) Khotbah pertama oleh Prof.dr.H.M.Quraisy Shihab, MA. (waktu itu Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta); dan ceramah ilmiah perdana Prof.Dr.H.Nurcholish Madjid.

4) Spesifikasi Bangunan

- a) Bangunan dalam tapak 10 hektar, terletak dipusat kota, Jalan Masjid raya No. 57, lokasi bekas kampus Universitas Hasanuddin.
- b) Pondasi memakai tiang pancang kedalaman 21 meter dengan sebanyak 450 titik. Memakai konstruksi beton bertulang dengan karakteristik (K) 225. Rangka atap konstruksi baha dibungkus beton. Penutup atapnya dari tembaga/tegola buatan Itali. dinding dilapisi granit. Lantai I memakai keramik. Lantai II dan III memakai granit.
- c) Bangunan utama terdiri atas tiga lantai, dengan luas keseluruhan 6.932 M². Lantai I (2916M²), untuk kantor secretariat, Aula, Perpustakaan, Pendidikan, Koperasi, Kantor MUI Sulawesi Selatan dan Baitul Maal (BMT). Lantai II (2916 M²) dan Lantai III (1.100 M²) untuk

- Sholat. Lantai III diperuntukkan khusus untuk jamaah perempuan.
- d) Dapat menampung 10.000 dalam masjid, untuk sholat Id, dengan menggunakan pekarangan masjid dapat menampung 50.000 jamaah.
 - e) Tinggi menara 84 meter, dengan ukuran 3 x3 meter, kurang 1 meter dari Menara Masjid Nabawi.
 - f) Pada menara di ketinggian 17 meter terdapat bak penampungan air sebesar 30 m³.
 - g) Penerangan listrik masjid dan kawasannya memanfaatkan listrik PLN 100 KVA, dihias lampu kristalceko 4 buah yang menggantung di lantai II, beratnya 4 ton.
 - h) Loudspeaker terdapat 16 buah di menara yang suaranya menjangkau radius 5 km; 20 speaker di lantai I, 14 speaker di lantai II, 6 speaker di lantai III, 6 speaker di halaman dan 8 speaker di atap, sehingga seluruhnya berjumlah 70 speaker.
 - i) Tempat wudhu disediakan dua buah-utara dan selatan-bangunan utama. Dilengkapi 178 buah keran, 18 kamar mandi/WS, urinor 18 buah, wasrafel 8 buah, serta 12 kloset.
 - j) Mihrab dan dinding granit warna hitam dihiasi ragam kaligrafi segi empat dari tembaga kekuning-kuningan.

Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah.

Diatas mihrab tertulis Qs. Al Baqarah: 144. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.

Di dinding sebelah kanan, dibawah ragam segi empat belah ketupat itu berturut tertulis: Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, yang mereka khusyu' dalam shalatnya.

(Qs. Al A'raf : 55) Berdoalah kepada Tuhan Pemeliharaanmu dengan kerendahan hati dan suara pelan; sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melanggar aturan.

(Qs. Annisa : 103) Sesungguhnya shalat itu bagi orang-orang mukmin merupakan kewajiban pada waktu yang telah ditentukan.

Dan khusus di dinding sebelah kiri, juga dibawah ragam segi empat beah ketupat berturut-turut tertulis;

(Qs. Al Baqarah : 45) Hendaklah kamu memohon pertolongan supaya dapat bersabar dan bershalat, sungguh hal itu perkara berat, kecuali bagi orang-orang khusyu'.

(Qs. Al An'am : 162) Se4sungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya milik Allah Tuhan Pemelihara semesta alam.

(Qs. Al Imran : 96) Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk ibadah bagi manusia, ialah yang berada di Makkah, penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

5) Pusat-Pusat Kegiatan

Yayasan Islamic Center atau Al Markaz Al Islami merupakan pancaran nur Islam dari Indonesia Kawasan Timur. Dalam Pancaran ini Insy Allah akan terbesit juga semangat dan dedikasi masyarakatnya menuju kepada keberhasilan pembangunan nasional menuju kepada keberhasilan pembangunan nasional menuju Indoensia adil makmur yang kita cita-citakan bersama. Islamic Center adalah himpunan sumber daya masyarakat yang diarahkan kepada kemakmuran masyarakat dalam jalan Islam.

a) Pusat/Fasilitas Ibadah

Berupa masjid dan auditorium; selain berfungsi sebagai fasilitas ibadah, juga bisa menjdi sarana pendidikan, kegiatan sosial maupun budaya umum.

Dalam lahan seluas 10 hektar di tengah kota Ujung Pandang, Pusat Ibadah ini akan tampil dominan dengan ukuran dan bentuknya yang megah sekaligus setempat dan modernitas. Sebagai masjid terbesar di kawasan Timur Indonesia, Insy Allah masjid ini dapat sekaligus mewakili kebangga dan identitas masyarakatnya.

b) Pusat Pengembangan/Penelitian

Tradisi ilmiah dalam Islam wajib dipelihara dan dimakmurkan, penguasaan ilmiah bahkan disunnahkan bagi muslim muslimah, ilmu, dalam hal ini tidak terbatas kepada ilmu-ilmu agamawi saja, tetapi

seluas-luasnya, baik mengenai ilmu pasti, alam, hayat, masyarakat, kemanusiaan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain.

Apalagi sekarang, dalam kehidupan kini, semakin jelas bahwa penguasaan atas informasi adalah kekuatan duniawi terbesar. Islamic Center menyadari sepenuhnya masalah ini, sebagai salah satu jawabnya, Yayasan menawarkan sarana bagi kegiatan-kegiatan ilmiah dalam Islamic Center. Dengan sendirinya, Pusat Pengembangan/Penelitian dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dalam bidangnya.

c) Pusat Pendidikan

Pusat Pendidikan diharapkan menjadi inti dari Islamic center, karena proses penyiapan Sumber daya Manusia dimulai dari sini. Bahkan dalam jangka panjang, citra Pusat Pendidikan inilah yang akan menjadi citra keseluruhan. Mengingat pentingnya kedudukan pusat ini, maka sejak awal telah dilakukan penelitian mengenai konsep dan strategi pendidikan yang tepat di tengah dinamika Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya.

Pusat Pendidikan akan mengacu kepada beberapa sasaran strategis, yaitu: Pendidikan Dasar dan Menengah 12 tahun, Pendidikan Kejuruan Lanjutan, Pendidikan Jenjang Diploma, Perpustakaan.

d) Pembangunan Fisik

Untuk melaksanakan niat serta lahan akhirnya diputuskan auditorium tidak jadi dibangun dan sebagai gantinya lantai I Masjid akan dirubah tata ketaknya sehingga dapat berfungsi sebagai Aula.

Sedangkan sekolah akan dibangun pada tahap II. Masjid Al Markaz Al Islami dibangun dengan biaya ± Rp. 13. M – Daya tampung masjid sebagai berikut :

- a. Lantai I = 4000 Jamaah
- b. Lantai II & III = 6000 Jamaah
- c. Plasa dan Halaman = 25.000 Jamaah

Luas masjid dan daya tampung jamaah harus disesuaikan, akan halnya dengan masjid yang terlalu besar akan sulit di atur. Sedangkan Masjid Al Markaz Al Islami mempunyai daya tampung

6000 – 10.000 adalah sangat ideal dan efektif untuk program dan kegiatan-kegiatan lainnya.

e) Kegiatan

Dalam upaya memakmurkan masjid ada beberapa kegiatan yang telah / sedang berjalan (terlampir jenis kegiatan/penanggungjawab dan jadwal kegiatan tahunan Masjid Al Markaz Al Islami).

f) Ibadah/Dakwah

Shalat lima waktu, shalat Jum'at, shalat tarawih dan shalat Raya (Idul Fitri dan Idhul Adha) berjalan dengan baik sesuai fungsi utama masjid. Jamaah yang mengikuti shalat lima waktu sudah merupakan jamaah tetap yang pada umumnya bertempat tinggal di sekitar Masjid Al Markaz tetapi banyak juga yang datang dari luar Ujung Pandang. Sejak perseminan (Jum'at/12 Januari 1996 M / 21 Sya'ban 1416 H) jamaah yang melaksanakan shalat Jum'at sangat padat, begitu pula dengan shalat Tarawih dan Hari Raya Idhul Fitri serta Idhul Adha.

Penceramah / Khatib telah direncanakan dan diatur setiap empat bulan, walaupun ada penceramah dari Jakarta/Yogyakarta akan diberikan kesempatan awal untuk berceramah. Pelaksanaan dakwah/ceramah kerjasama dengan IAIN, MUI dan lembaga-lembaga Islam yang terbaik. Agar dakwah dan masjid tetap menarik dan ramai diikuti oleh jamaah maka harus menggunakan media yang lebih terencana dan komunikatif (dialog).

Majelis taklim wanita yang rutin diadakan setiap hari Sabtu dihadiri oleh kurang lebih 300 orang, dengan lebih mengutamakan pengajian dasar pendalaman. Imam, Muadzin dan penceramah/Khatib telah ditetapkan lebih awal melalui seleksi dan akan tetap diadakan penyempurnaan dari waktu ke waktu.

g) Pendidikan

Pendidikan pada Masjid Al Markaz adalah pendidikan non formal, tetapi bersifat teratur dan terdaftar serta mempunyai sistem nilai : Anak-anak, remaja, Mahasiswa, dan Dewasa.

-) Kajian-kajian temporer berupa pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan jurnalistik, muadzin, kajian ramadhan dan lain-lain.
-) Pengkajian Islam dan Kemasyarakatan, dengan menghadirkan ilmuwan sebagai narasumber yang berasal dari Jakarta/ Yogyakarta/ Bandung.
-) Kuliah Dhuha dilaksanakan setiap Ahad yang dihadiri oleh mahasiswa dan jamaah Masjid Al Markaz dengan pembawa materi ilmuwan yang berasal dari Ujung Pandang.
-) Perkemahan Remaja telah berlangsung 2 kali dengan mendatangkan peserta dari SMP dan SMA se Kotamadya Ujung Pandang.

h) Sosial

Suatu masjid yang indah akan lebih indah apabila masyarakat dan jamaahnya meningkat kehidupan dan kegiatan sosial ekonominya berkat kegiatan-kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh jamaah masjid itu sendiri, untuk kegiatan sosial jamaah masjid harus lebih intensif.

Dimulai dari pengedaran kotak amal, pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq an sedeqah juga dibutuhkan kepekaan sosial yang lebih tinggi dari jamaah, Untuk mengembangkan usaha kecil seperti saat ini telah berjalan kegiatan ekonomi berupa :

- 1) Toko-toko buku dengan sistim pembayaran bagi hasil 60% pemilik toko buku dan 40% al Markaz.
- 2) Pasar Jum'at di selasar sebelah selatan masjid setiap hari jum'at dengan membayar infaq ke Masjid sebesar Rp. 2000,-
- 3) Kantin Al Markaz dengan membayar infaq Rp. 20.000,- per minggu.
- 4) Bazar Ramadhan

Kegiatan ekonomi lainnya adalah dengan mempersewakan salah satu ruangan pada lantai I sebagai tempat dilaksanakannya persta perkawinan, seminar, pameran dan lain-lain dengan biaya sewa gedung Rp. 300.000,- Khusus untuk institusi/lembaga sosial akan diberikan keringanan dengan memberikan potongan harga.

i) Kegiatan Lain

- a. Radio Al Markaz telah berfungsi kurang lebih satu tahun dan mengudara setiap hari dari jam 04.30 sampai jam 24.00 WITA, Radio tersebut disamping menyiarkan paket acara umum juga secara tetap merely kegiatan dakwah (Kajian, Shalat dan Khotbah Jum'at, adzan dan Lain-lain) dengan jangkauan 60 KM2.
- b. BMT Al Markaz juga telah berjalan dengan menghimpun dana awal dari Pengurus dan Jamaah Masjid Al Markaz yang sekaligus sebagai pendiri BMT Al Markaz.
- c. Perpustakaan Al Markaz yang telah berfungsi dengan buku. Koleksi buku di perpustakaan Al Markaz telah berjumlah 20.000 Exp dengan 16.000 Judul. Adapaun buku-buku yang terkumpul selain diadakan oleh masjid sendiri juga banyak disumbangkan dari luar baik perorangan maupun instansi/lembaga pemerintah dan swasta.
- d. Penerbitan Al Markaz yang menerbitkan bulletin Gema Al Markaz setiap Jum'at dengan menampilkan bahan/materi khotbah Jum'at sebelum dan tulisan/artikel lainnya.

7. Masjid Istiqlal

a. Sejarah

Masjid Istiqlal (arti harfiah: Masjid Merdeka) ialah masjid nasional negara Republik Indonesia yang berada di bekas Taman Wilhelmina, di Timur Laut Lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional (Monas), di pusat ibukota Jakarta. Di seberang Timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Imam besarnya ialah Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. serta Ketua tubuh Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal kini ialah KH. Muhammad Muzammil Basyuni.

Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai gejala dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilaksanakan oleh Ir. Soekarno terhadap tanggal 24 Agustus 1951.

Arsitek Masjid Istiqlal ialah Frederich Silaban, seorang Kristen Protestan. Masjid ini mempunyai gaya arsitektur kekinian dengan dinding serta lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen

geometrik dari baja antikorosi. Bangunan utama masjid ini terdiri dari lima lantai serta satu lantai basis. Bangunan utama itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi jumlah 96,66 meter menjulang di sudut Selatan selasar masjid.

Masjid ini dapat menampung lebih dari 200000 jamaah. Selain dipakai sebagai kegiatan ibadah umat Islam, masjid ini juga dipakai sebagai kantor beragam organisasi Islam di Indonesia, kegiatan sosial, serta aktivitas umum. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang populer di Jakarta. Keseringan wisatawan yang berkunjung lazimnya wisatawan domestik di samping beberapa wisatawan asing yang beragama Islam.

Masyarakat non-Muslim juga bisa berkunjung ke masjid ini sehabis lebih awal memperoleh pembekalan informasi tentang Islam serta Masjid Istiqlal, walaupun area yang boleh dikunjungi kaum non-Muslim terbatas serta sesegera mungkin disertai pemandu. Pada hari besar Islam layaknya Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad dan Isra serta Mi'raj. Presiden Republik Indonesia senantiasa mengadakan aktivitas keagamaan di masjid ini yang diberitakan secara langsung melewati televisi nasional (TVRI) serta beberapa televisi swasta. Masjid Istiqlal merupakan masjid negara Indonesia, yaitu masjid yang mewakili umat muslim Indonesia. pasal menyangkut tingkat terhormat ini tersebutkan masjid ini sesegera mungkin bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan merupakan juga menggambarkan semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Masjid ini dibangun sebagai ungkapan serta wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, atas dikarenakan berkah serta rahmat Allah SWT yang sudah menganugerahkan enak kemerdekaan, terbebas dari cengkaman penjajah. pasal itulah masjid ini dinamakan "Istiqlal" yang dalam bahasa Arab bermakna "Merdeka". Masjid ini bergaya arsitektur Islam kekinian internasional, yaitu menerapkan bentuk-bentuk geometri sederhana layaknya kubus, persegi, serta kubah bola, dalam ukuran raksasa buat memicu aura agung serta monumental. Bahannya pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, serta minimalis, yaitu marmer putih serta baja antikorosi (stainless steel).

b. Arsitektur

Ragam hias ornamen masjid pun bersifat sederhana namun elegan, yaitu pola geometris berbentuk ornamen logam krawangan (kerangka logam berlubang) berpola lingkaran, kubus, atau persegi.

Ornamen-ornamen ini disamping berfungsi sebagai penyekat, jendela, atau lubang udara, juga berfungsi sebagai unsur estetik dari bangunan ini. Krawangan dari baja ini ditempatkan sebagai jendela, lubang angin, atau ornamen koridor masjid. Pagar langkan di tepi balkon tiap lantainya dan pagar tangga pun terbuat dari baja antikarat. Langit-langit masjid serta area dalam kubah pun dilapisi kerangka baja antikarat. Dua belas pilar utama penyangga kubah pun dilapisi lempengan baja antikarat. Karena bangunan yang begitu besar serta luas, bila memanfaatkan semua permukaan lantai di seluruh area bangunan, masjid ini bisa menampung maksimal sekitar 200000. jamaah, walaupun demikian kapasitas ideal masjid ini ialah sekitar 120000. jamaah.

Masjid ini memiliki arsitektur yang bergaya kekinian. Jamaah serta wisatawan yang berkunjung ke masjid ini bisa menatap konstruksi kokoh bangunan masjid yang didominasi oleh batuan marmer terhadap tiang-tiang, lantai, dinding serta tangga dan baja antikarat terhadap tiang utama, kubah, puncak menara, plafon, dinding, pintu krawangan, tempat wudhu, serta pagar keliling halaman. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Istiqlal juga merupakan obyek wisata religi, pusat pendidikan, serta pusat kegiatan syiar Islam. Dengan berkunjung ke masjid ini, jamaah serta wisatawan bisa menatap keunikan arsitektur masjid yang merupakan perpaduan antara arsitektur Indonesia, Timur Tengah, serta Eropa.

8. Masjid Baiturahman Banda Aceh

a. Sejarah Masjid Baiturahman Banda Aceh

Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan kalau masjid yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alaidin Mahmudsyah. Masjid Kerajaan yang asli menampilkan atap jerami berlapis-lapis, yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh.

Ketika Kolonial Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya yang asli sebagai benteng pertempuran, dan menyerang pasukan Royal Belanda dari dalam masjid. Pasukan Royal Belanda pun membalas dengan menembakkan suar ke atap jerami masjid, yang menyebabkan masjid terbakar. Jendral van Swieten pun menjanjikan pemimpin lokal bahwa dia akan membangun kembali Masjid Raya dan menciptakan tempat yang hangat untuk permintaan maaf. Pada

tahun 1879 Belanda membangun kembali Masjid Baiturrahman sebagai pemberiandan untuk mengurangi kemarahanrakyat Aceh. Konstruksi dimulai pada tahun 1879, ketika batu pertama diletakkan oleh Tengku Qadhi Malikul Adil, yang kemudian menjadi imam pertama di Masjid Raya baru ini, dan diselesaikan pada 27 Desember 1882 ketika masa pemerintahan Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Syah.

Banyak orang Aceh yang awalnya menolak untuk beribadah di Masjid Raya Baiturrahman yang baru ini karena dibangun oleh orang Belanda, yang awalnya merupakan musuh mereka. Namun sekarang Masjid ini telah menjadi kebanggaan Banda Aceh. Kerajaan Belanda membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman pada saat Sultan Muhammad Daud Syah Johan Berdaulat masih bertahta sebagai Sultan Aceh yang terakhir.

Pada awalnya, Masjid Raya Baiturrahman hanya memiliki satu kubah dan satu menara. Kubah-kubah dan Menara-menara ekstra baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hari ini Masjid Raya Baiturrahman memiliki 7 kubah dan 8 menara, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh.

Masjid Raya Baiturrahman selamat dari Gempa dan Tsunami 2004 dengan hanya mendapat sedikit kerusakan seperti beberapa dinding yang retak. Salah satu menara 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa tersebut. Disaat bencana alam tersebut, Masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah setelah 2 minggu.

Masjid Raya Baiturrahman awalnya dirancang oleh arsitek Belanda Gerrit Bruins. Desainnya kemudian diadaptasi oleh L.P. Luijks, yang juga mengawasi pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor Lie A Sie. Desain yang dipilih adalah gaya kebangkitan Mughal, yang dicirikan oleh kubah besar dengan menara-menara. Kubah hitam uniknya dibangun dari sirap kayu keras yang digabung menjadi ubin.

Interiornya dihiasi dengan dinding dan pilar be-relief, tangga marmer dan lantai dari Tiongkok, jendela kaca patri dari Belgia, pintu kayu berdekorasi, dan lampu hias gantung perunggu. Batu-batu bangunannya berasal dari Belanda. Pada saat penyelesaiannya, desain yang baru pada masanya ini sangat kontras dibandingkan dengan

masjid-masjid khas Aceh disaat itu, yang mengakibatkan banyak orang Aceh menolak untuk shalat di Masjid Raya Baiturrahman ini, ditambah lagi karena masjid ini dibangun oleh "orang kafir" Belanda. Namun sekarang, Masjid Raya Baiturrahman telah menjadi masjid kebanggaan Banda Aceh.

9. Masjid Baiturrahmah Padang

Masjid Baiturrahmah ini berada di Jalan Prof. Dr. Hamka No.20 Kota Padang, Sumatera Barat yang merupakan salah satu tempat ibadah termegah di kota Minang. Masjid ini berada di kampus, yakni Universitas Baiturrahmah. Masjid Baiturrahmah merupakan pengembangan dari masjid kampus Universitas Baiturrahmah, yang sebelumnya bernama Masjid Jabal Rahmah. Sebelumnya masjid ini hanya diakses oleh mahasiswa, tidak oleh masyarakat. Hal ini disebabkan letaknya yang tidak begitu terlihat oleh masyarakat yang melintas di jalan *by pass*.

Saat ini, Masjid Baiturrahmah tidak hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa, bisa juga karyawan, keluarga pasien Rumah Sakit Islam Siti Rahmah dan masyarakat sekitar. Biaya pembangunan Masjid Baiturrahmah ini murni ditanggungoleh Pendiri Yayasan Baiturrahmah, H. Amran St Sidi Sulaiman. Masjid Baiturrahmah ini diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla pada bulan Juni kemarin.

Kalau dilihat, Masjid Baiturrahmah ini memiliki gaya arsitektur Timur Tengah dan banyak dikunjungi, seperti Masjid Raya Sumatera Barat. Cahaya hijau dari lentera Masjid Baiturrahmah membuat perbedaan dengan masjid-masjid lainnya. Pada siang hari, Masjid Baiturrahmah tampak begitu putih dan bersih.

10. Masjid Jami' Birugo Bukit tinggi

Mesjid yang berdiri megah ini adalah bangunan monumental yang dibangun pada tahun 1956, batu pertamanya diletakkan oleh Inyiah Sekh Ibrahim Musa Parabek, didampingi oleh Inyiah Haji Abu Samah dan orang tuo-tuo kita di Birugo. Mesjid ini adalah pengganti mesjid Jami' yang telah ada sebelumnya.

Tidak jauh dari Masjid Jami Birugo, ada sebuah surau (mushala) dengan menara mirip Jam Gadang yang menjadi *landmark* kota Bukittinggi.

Di depan mushalla ada kolam. Surau-surau di ranah Minang (terutama yang di pedalaman) selalu ada kolam di depannya. Dulu

kolam itu diguakaan untuk berwudhu, sekarang fungsinya tidak lebih sebagai penampung air bekas wudhu. Selain di masjid, masih banyak rumah-rumah penduduk di Bukittinggi dilengkapi dengan kolam, seperti foto di bawah ini.

11. Masjid Raya Darussalam Batam

Masjid ini dibangun diatas tanah seluas 75.000 m2 pada tahun 1999, atas prakarsa Ismed Abdullah ketua Otoritas Batam serta diarsiteki oleh Ir. Achmad Noe'man di Batam Center, Kota Batam. Bangunan masjid ini berbentuk paduan antara balok bujur sangkar pada bagian bawah dan lintas sama sisi pada bagian atas yang merupakan kepala bangunan. Luas ruang solat seluruhnya 2.515 m2 dan mampu menampung 3.500 jamaah, bagian luar mampu menampung 15.000 jamaah, Ruang wudlu pria seluas 506,7 m2, runag wudlu wanita seluas 178,1 m2. Ruang penitipan barang seluas 39,96 m2, Ruang kegiatan 2.190,3 m2. dan menara setinggi 66 meter.

12. Masjid Raya Baitussyakur

Masjid Raya Baitussyakur pertama kali dibangun sekitar tahun 1980-an, sejak dibangun di sekitar masjid ini memang sudah ada tujuh makam tua tanpa identitas yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Pengurus masjid sendiri sulit menelusuri asal-usul makam karena tidak ditemukan artefak atau petunjuk di nisan yang menunjukkan identitas makam tersebut. Belum ada dari pihak terkait (pemerintah) atau sumber lain yang menyatakan keterangan identitas 7 makam tersebut. Masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma Kota Batam mengklaim makam makam tersebut adalah makam leluhur mereka, sehingga setiap bulan Ramadhan banyak warga Tanjung Uma Batam yang datang berziarah.

Lokasi masjid tersebut berada memang masih di wilayah area Tanjung Uma, maka diperkirakan, 7 makam tersebut merupakan orang-orang yang pertama menempati wilayah Kampung Tua Tanjung Uma sekitar Jodoh Nagoya, di antaranya Syekh Abdullah Syukur yang hingga kini diabadikan dengan nama masjidnya yaitu Baitusyukur. Menurut keterangan penjaga masjid dan makam bernama Akmad, ada sebagian peziarah yang bercerita, 1 dari 7 makam di dalam masjid berasal dari Suku Bugis - Melayu bernama Syekh Abdulah Syukur. Namun ada juga yang menyebutkan Syeh Abu Bakar. Akan tetapi tidak ada yang kaitan dengan Kerajaan Riau Linga. Dia menuturkan, ketika 7 makam tersebut mau dipindahkan karena dinilai kurang pas ada makam di dalam masjid, alat berat untuk memindahkan makam

selalu mati alias mendadak mogok, hingga pada akhirnya makam dibiarkan ditempatnya hingga kini berada di dalam masjid setelah renovasi.

Al-Habib Mohammad Rizieq bin Husein Syihab atau populer dengan panggilan Habib Rizieq mendatangi masjid Baitussyakur Jodoh pada Minggu 28 November 2010. Kehadiran salah satu pendiri Fron Pembela Islam (FPI) ini dalam rangka rangkaian perjalanannya ke Sumatera. Menurut Sekjend DPD FPI Kepri, Arlis MD, ceramah agama tersebut diberikan dalam rangka penyegaran pemahaman tentang islam serta hal lainnya yang berhubungan dengan muamalah amaliah dalam kehidupan sehari-hari terutama terkait hal-hal kemaksiatan yang bisa mengganggu keimanan. Habib Rizieq memang selalu berpesan agar DPD FPI Kepri dan DPW FPI Batam terus memantau tempat-tempat maksiat. Di Batam ini terlalu banyak tempat indikasi maksiat yang bisa merusak moral umat dan generasi muda Indonesia.

Selain itu, agenda lain yang dihadiri oleh Habib Rizieq adalah menghadiri dialog umat beragama di hotel PIH Batam Centre, membahas tentang pendirian tempat umat beragama sesuai dengan surat keputusan bersama dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Selain dihadiri oleh Habib Rizieq, kegiatan ini juga akan mendatangkan dosen UIN Syarif Hidayatullah Sobri Lubis.

13. Masjid Raya Stabat

Masjid Raya Stabat adalah salah satu masjid Bersejarah yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selain Masjid Azizi yang ada di Tanjung Pura. Masjid ini memiliki corak Melayu yang khas, dapat dilihat dari warna masjid yang warnanya kuning dan hijau, warna kebesaran suku Melayu. Masjid ini berada di Kota Stabat, ibukota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tepat di sisi sungai Wampu, tepatnya di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Medan-Aceh.

Masjid ini dibangun dua tahun setelah pembangunan Masjid Raya Azizi. Tepatnya pada tahun 1904, mulai dikerjakan proyeknya Semasa Kejuruan Stabat Tengku HM Khalid. Pada mulanya Bangunan ini terdiri dari bangunan induk seluas 20 meter persegi. Kemudian ditambah teras dua meter keliling dengan satu buah menara. Saat itu jama'ah yang dapat ditampung hanya menghasilkan 300 orang.

Masjid Raya Stabat ini telah berkembang pesat, luas areal masjidnya saat ini menjadi 4.454 meter persegi dengan daya tampung mencapai 1350 jamaah.

14. Masjid Raya Binjai

Binjai adalah salah satu kota otonom di provinsi Sumatera Utara. Di kota ini telah lama berdiri sebuah masjid raya yang sudah lebih dari 120 tahun, biasa dikenal dengan nama Masjid Raya Binjai. Dengan usianya yang telah melampaui satu abad bangunan masjid ini masuk ke dalam kategori Masjid Bersejarah, Salah satu warisan dari Kesultanan Langkat.

Masjid Raya Binjai Pertama kali dibangun Oleh Sultan Langkat Tuanku Sultan Haji Musa Al Khalid Al Mahadiah Muazzam Shah (Tengku Ngah) Bin Raja Ahmad Yang menjabat priode 1840 - 1893. Peletakan Batu pertamanya Tahun 1887. dimasa Tuanku Sultan Haji Musa Pembangunan Masjid Suami Belum rampung . dan Setelah Mangkatnya Tuanku Sultan Haji Musa, Kesultanan diperintah oleh putranya Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah (1893 - 1927).

Masjid ini pun selesai dan diresmikan oleh Tuanku Sultan Abdul Aziz lebih kurang tahun 1894. Pada tahun 1924 dilakukan untuk mengubah kubah yang ada dimasjid. Dan sampai sekarang pun hal itu tidak dilakukan lagi. Pada tahun 1990-an renovasi dilakukan terhadap lantai tras masjid begitu pula dengan pembangunan menaranya.

15. Masjid At-Taqwa Batubara

Titik permulaan penerokaan dan pelengkap Kampung Bukit Kapar memiliki aliran yang rapat dengan perkembangan Pekan Kapar sebagai salah satu kawasan penempatan penduduk yang dirangsang dengan potensi perkembangan kawasan pertanian yang diusahakan di tahun 1900an. Fenomena ini telah menjadikan penduduk Pekan Kapar bertambah dengan pesatnya. Berfungsi pada faktor-faktor yang mengusahakan aktiviti pertanian di daerah baru ini, mendorong kumpulan peneroka tersebut untuk menjadikannya sebagai satu penempatan penduduk yang bersifat kekal. Mereka mengambil keputusan untuk berpindah dan menetap bersama keluarga masing-masing di kawasan pertanian yang baru di terokai. Maka dengan ini, salah satu lokasi yang telah diwujudkan adalah sebuah batu asas kepada penubuhan sebuah kampung yang kemudian dinamakan dengan nama Kampung Bukit Kapar.

Penambahan jumlah penduduk semakin cepat ekoran penghijrahan peneroka baru. Bagi memudahkan urusan pentadbiran tanah di Mukim Kapar Daerah Klang, Kerajaan Inggriss pada masa itu telah melakukan semula banyak-banyak dimensi yang telah dimajukan dengan hakpias sempadannya. Melalui kerja-kerja pengukuran dan pengawasan tanah Ini juga, Kerajaan Inggriss telah memperuntukan satu lot tanah yang berbentuk segi tiga dengan keluasan dianggarkan satu (1) ekar sebagai tapak membina masjid. Keperluan tempat beribadah yang sempurna berasaskan kepada penduduknya, sebuah masjid perlu didirikan untuk menampung bilangan jumlah jemaah yang semakin padat. Berhubungan dengan itu penduduk kampung telah bersetuju untuk membina Sebuah masjid bagi surau yang sedia ada. Penduduk kampung telah membina -bangi. Bahan binaan masjid berasaskan sepenuhnya menghasilkan kayu dan beratapkan zink. Masjid yang dibina bercirikan rumah tradisional melayu yang memiliki lantai yang tinggi untuk mengelakkan masalah banjir memandangkan daerah kampung pada asalnya adalah sebuah kawasan tanah gambut yang berpayau. Masjid itu oleh penduduk kampung halaman 1050an. Pada tahun 1969 masjid ini telah dibina semula untuk menampung kepadatan jemaah yang bernilai RM 60 ribu sahaja dan pada tahun 1971 Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Idris Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj telah berkenan merasmikan masjid tersebut dengan nama Masjid At - Taqwa, Kampung Bukit Kapar, Klang.

Di awal tahun 1980an, Masjid At-Taqwa yang sedia ada diubahsuai membuat kali pertama dengan tujuan untuk menambah ruang sembahyang memandangkan jumlah jemaah yang bertambah. Ini menunjukkan bahawa jumlah penduduk Kampung Bukit Kpar telah meningkat dari selama ke masa. Ahli Jawatankuasa Pentadbiran Masjid At-Taqwa telah berjaya mendapatkan peruntukan untuk mengubahsuai masjid dari kerajaan itu RM120 ribu sahaja. Sisa dari menariknya ruang Masjid At-Taqwa kekal tanpa sebarang pengubahsuaian selama 20 tahun. Manakala struktur Bangunan masjid hampir 30 tahun. Kronologi pembinaan semula masjid at-taqwa baharu kampung bukit kapar, klang 30 Julai 1999 Jawatan kuasa Pembangunan Masjid Baharu At-Taqwa ditubuhkan, Dr Ibrahim Ghafar dilantik sebagai pengerusi. 10 Jan 2000 Permohonan rasmi telah dikemukakan untuk Kerajaan Negeri Selangor melalui Jabatan Agama Islam Selangor untuk mendapatkan peruntukan RM 10 juta bagi membina masjid baharu. 3 Mac 2007 Penyerahan tapak untuk pembinaan masjid oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Daerah Klang

kepada Pejabat Agama Islam Daerah Klang 2 Jan 2009 Tarikh asal (Tempoh Pembinaan 18 Bulan) 3 Mac 2009 Tarikh siap dikembangkan selama 60 hari (Belum Masih Gagas) 1 Jun 2009 Tarikh siap dilanjutkan lagi selama 90 hari 14 Ogos 2009 Pembinaan masjid sudah berjalan 80 peratus dan satu upacara membasuh ruang dewan solat diadakan.

Pada 4 September 2009 Pihak JKR Klang menyerahkan kunci masjid kepada Pejabat Agama Islam Daerah Klang dan kata kunci untuk Nazir Masjid Ustaz Mohd Faryzan bin Mohd Subkhi. 4 Sep 2009 Solat Jumaat dan solat terawih pertama disempurnakan di masjid tersebut. 28 Sept 2009 Masjid dirobuhkan dan dijadikan tapak lokasi kereta.

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah di pilih selama penelitian berlangsung. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan.

Hasil temuan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara dan pengisian daftar *checklist* yang diberikan kepada pengurus masjid yang dianggap mengetahui bentuk pengelolaan dan perlaporan keuangan yang dipakai di masjid mereka. Adapun pihak yang diwawancarai, Kemudian mengisi daftar *checklist* dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel. 4.1

Nama Informan

NO	NAMA PENGURUS MASJID	NAMA MASJID
1	H. Adibo Sakka Ambo	Masjid Raya Makassar
2	Drs. KH. Muhammad adnan Harahap	Masjid Istiqlal Jakarta
3	M. Rizqi Rahim	Masjid Jogokarian Yogyakarta
4	Hasim Ikhwanudin	Masjid Pogung Dalangan
5	T. Syahputra, SE	Masjid Al-Jihad Medan

6	Drs. Hikmal Hakim	Masjid Ar-Rahman Medan Marelان
7	Hafidun	Masjid Pogung Raya Yogyakarta
8	Hj. Asni Tayib, SH	Masjid Al-Markaz Makassar
9	Drs. H. M Yassin, MA	Masjid Raya Binjai
10	Hanafiah Musa	Masjid Agung Binjai
11	Dr. M. Yamin, MA	Masjid Baiturrahim BTN Skyline Jaya Pura
12		Masjid raya Stabat
13	H. Deden Muhammad Syukri	Masjid Jamik Birugo Bukit Tinggi
14		Masjid At-Taqwa Batu Bara
15	Ikhyar	Masjid Baitussyakur Batam
16	Drs H. Munajat	Masjid Darussalam KDA Batam Kuta- Kepri
17	Dhamhuri Zain	Masjid Baitul Muqarrabin Aceh
18	Drs. H. Hamdan Syamsuddin	Masjid Baiturrahman Banda Aceh

1. Tujuan Laporan Keuangan Masjid bagi masjid yang menjadi yang menjadi Objek penelitian:
 - a. Memberikan kepuasan kepada jamaah masjid karena dengan adanya laporan keuangan mesjid memberikan rasa kenyamanan bagi jamaah mengenai ketransparanan dan kejujuran dari pengelola masjid
 - b. Memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kepada jamaah masjid
 - c. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dana yang di sedekahkan jamaah masjid.
2. Komponen laporan keuangan yang digunakan masjid yang menjadi objek penelitian
 - a. Komponen neraca (posisi keuangan), penerimaan dan pengeluaran, adapun komponen tersebut digunakan oleh masjid Jogokariyan Yogyakarta.

Tabel. 4.2
Laporan Keuangan Ta'mir Masjid

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1433 H	139.152.000	122.094.000	17.058.000
1434 H	162.500.700	135.235.000	27.265.700
1436 H	223.981.000	217.952.000	6.029.000
1437 H	287.139.000	234.527.000	52.612.000

Sumber: Buletin Idul Fitri Masjid Jogokariyan

Tabel. 4.3
Laporan Keuangan Kotak Infaq Jamaah Subuh

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1433 H	16.414.700	9.563.700	6.851.000
1434 H	15.890.900	4.555.500	11.335.400
1435 H	16.036.600	3.888.000	12.148.600
1436 H	26.102.600	11.870.000	14.232.600
1437 H	55.228.100	34.550.000	20.678.100

Sumber: Buletin Idul Fitri Masjid Jogokariyan

Tabel. 4.4
Laporan Keuangan Baitul Mall

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1435 H	165.954.150	130.715.150	35.239.000
1436 H	230.122.000	166.850.000	63.272.000
1437 H	253.651.500	79.512.000	174.139.500

Sumber: Buletin Idul Fitri Masjid Jogokariyan

- b. Komponen Penerimaan dan pengeluaran, adapun komponen tersebut digunakan oleh masjid Pogung Dalangan Yogyakarta, Pogung Raya Yogyakarta, masjid Raya Makassar, masjid Ar-rahman Terjun Medan Marelان, masjid Agung Binjai, dan masjid Raya Binjai, masjid Baiturrahim BTN Skyline Jaya Pura, masjid Baitussyakur, masjid Jamik Birugo Bukit Tinggi, masjid Darussalam KDA Batam Kuta- Kepri, masjid At-Taqwa Batu Bara, masjid raya Stabat, dan masjid Baitul Muqarrabin Aceh.

Tabel. 4.5

Laporan Keuangan Masjid Pada Umumnya

No	Tgl	Keterangan	Mutasi		Saldo Akhir
			Debet	Kredit	
1	01.03/2011	Saldo Awal Maret 2011	Rp. 3.160.900,00		Rp. 3.160.900,00
2	05.03/2011	Honorarium 2 orang pengurus masjid untuk bulan Februari 2011		Rp. 800.000,00	Rp. 2.360.900,00
3	05.03/2011	Biaya perbaikan Genset	Rp. 150.000,00		Rp. 2.210.900,00
4	07.03/2011	Intak Jumat Minggu	Rp. 320.000,00		Rp. 1.890.900,00
5	07.03/2011	Honorarium khathib Jumat Minggu I		Rp. 150.000,00	Rp. 2.040.900,00
6	11.03/2011	Intak Jumat Minggu I	Rp. 300.000,00		Rp. 1.740.900,00
7	11.03/2011	Honorarium khathib Jumat Minggu II		Rp. 150.000,00	Rp. 1.890.900,00
8	14.03/2011	Pembayaran ek. listrik untuk pemakaian bulan Februari 2011	Rp. 145.500,00		Rp. 2.475.315,00
9	14.03/2011	Pembayaran ek. air untuk pemakaian bulan Februari 2011	Rp. 55.225,00		Rp. 2.417.990,00
10	15.03/2011	Intak Jumat Minggu II	Rp. 274.000,00		Rp. 2.143.990,00
11	15.03/2011	Honorarium khathib Jumat Minggu III		Rp. 150.000,00	Rp. 2.293.990,00
12	25.03/2011	Intak Jumat Minggu IV	Rp. 320.000,00		Rp. 1.973.990,00
13	25.03/2011	Honorarium khathib Jumat Minggu IV		Rp. 150.000,00	Rp. 2.123.990,00
14	31.03/2011	Saldo Akhir Maret 2011	Rp. 2.714.950,00		Rp. 2.714.950,00

Sumber: *Pengelolaan Keuangan Masjid*

- c. Komponen laporan perencanaan anggaran untuk satu tahun, penerimaan dan pengeluaran, adapun komponen tersebut digunakan oleh masjid Al-Markaz Makassar.

Tabel 4.6

Kedaaan Keuangan Mingguan Masjid Al Markaz Al Islami
Laporan Jum**at ke-IV (16-22 juni 2017)

Saldo tanggal 15 juni			Rp 097.210.033,00
A. 2017/.....			
B. Penerimaan:			
Hasil kotak amal Jum'at 16 juni	Rp	18.360.000	
Hasil kotak amal tarwih 16-21 juni	Rp	10.630.000	
Seteran alas kaki kharis	Rp	3.000.000	
Seteran alas kaki tarwih 16-21 juni	Rp	4.000.000	
Seteran parkir kharis Jum'at 16 juni	Rp	5.010.000	
Seteran parkir tarwih 16-21 juni	Rp	17.685.000	
Seteran II bazar ramadhan 1428 H	Rp	782.207.330	
Seteran parkir peserta bazar ramadhan 1428 H	Rp	27.810.000	
Infak dari karyawan koperasi Al-Murabah	Rp	1.000.000	
Sedekah buka puasa tgl 18-22 Juni	Rp	228.600.000	
		JUMLAH	Rp 1.138.342.330
		TOTAL	Rp 1.835.552.963,00
C. Pengeluaran:			
Biaya personal	Rp	192.900.000	
Biaya pembinaan tamsah	Rp	12.500.000	
Biaya sekretariat	Rp	1.874.000	

Biaya PAR 1428 H tgl 16-22 juni	Rp	171.730.000	
Biaya pembangunan rumah imam & masjid	Rp	50.000.000	
Biaya pengelola parkir peserta bazar ramadhan	Rp	13.925.000	
Biaya pengelola kotak amal tarwih 15-21 juni	Rp	5.930.000	
Biaya pengelola alas kaki tarwih 15-21 juni	Rp	2.100.000	
Biaya pengelola parkir tarwih 15-21 juni	Rp	8.842.500	
Biaya operasional Jum'at	Rp	5.460.000	
		JUMLAH	Rp 169.761.100
	Saldo	16/07	Rp 1.365.791.463,06
	22/06/17	TOTAL	Rp 1.835.552.963,06

Laporan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami
Bulan Februari 2016 (tgl 1 s.d 29 Februari 2016)

A. Saldo Per 31-Januari Rp 871.983.413,61

B. Penerimaan

1. Kotak amal jum'at	Rp 47.575.000
2. Kotak amal tarwih	Rp -
3. Kotak amal idul fitri	Rp -
4. Kotak amal idul adha	Rp -
5. Gedung + Lantai II	Rp 16.350.000
6. Emlase	Rp 2.600.000
7. Kamlin	Rp -
8. Bazaar jum'at	Rp 8.520.000
9. Bazaar ramadhan	Rp -
10. Pendidikan PTQ LL	Rp 1.200.000
11. TK Al Markaz	Rp -
12. Alas kaki	Rp 5.900.000
13. Parkir	Rp 8.510.000
14. BMT KJKS Al Markaz	Rp 1.000.000
15. Koperasi Al Markaz	Rp 3.430.000
16. Lembaga Amil Zakat	Rp -

17. Sumbangan Infaq	Rp 10.000.000	
18. Sumbangan B. Poasa	Rp -	
19. Lain-lain	Rp -	
	<u>Jumlah</u>	Rp 115.083.000
		Rp 789.970.413,61

E. Pengeluaran

01.00 BPH Ibadah/dakwah		
01.01 Rutin	Rp 1.590.000	
01.02 Muballigh	Rp 13.160.000	
01.03 Pengislaman	Rp -	
01.04 Ramadhan B Poasa	Rp -	
01.05 Hari besar Islam	Rp 230.000	
		Rp 30.000.000
02.00 BPH Sarana & Pemeliharaan		
02.01 Rutin	Rp 409.000	
02.02 PLN	Rp 17.027.500	
02.03 PDAM	Rp 45.200	
02.04 Konstruksi & Pemeliharaan	Rp 16.794.000	
		Rp 34.275.700
03.00 BPH Ekonomi/Keuangan		
03.01 Rutin	Rp -	
03.02 Pengelolaan Bazaar Jum'at	Rp 2.556.000	
03.03 Pengelolaan Bazaar Ramadhan	Rp -	
03.04 Pengelolaan kotak amal	Rp 4.750.000	
03.05 Pengelolaan alas kaki	Rp 2.950.000	
03.06 Pengelolaan parkir	Rp 4.255.000	
		Rp 14.511.000
04.00 BPH Humas & Penerbitan		
04.01 Rutin	Rp -	
04.02 Buletin Jum'at	Rp -	
		Rp -
05.00 BPH Pemuda/OR/Kea.		
05.01 Rutin	Rp 83.400.000	
		Rp 83.400.000
06.00 BPH Sosial/Kesehatan		
06.01 Rutin	Rp 450.000	
		Rp 450.000
07.00 BPH Perpustakaan & Arsip		
07.01 Rutin	Rp 1.044.000	
		Rp 1.044.000
8.00 BPH Perempuan & majelis Ta'lim		

08.01 Rutin	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
09.00 BPH Keamanan & ketertiban			
09.01 Rutin	Rp 1. 100.000		
09.02 Keamanan Jam'at	Rp 1. 000.000		Rp 1. 100.000
10.00 Keberuhan & pertamanan			
10.01 Rutin	Rp 748.000		Rp 748.000
11.00 Sekretariat			
11.01 Rutin	Rp 11.548.100		
11.02 Personil	Rp 90.020.000		
11.03 Telepon/internet	Rp -		
11.04 Bank/pajak	Rp 286.000		
11.05 Tab Qurba, jamsostek dll	Rp 1.000.000		Rp 109.585.800
12.00 Cadangan			
12.01 Rutin	Rp 1.000.000		
12.02 Tambahan	Rp 21.305.600		
			Rp 36831.600
			Rp 122.451.500
			Rp 465.618.918,61
			Rp 388.076.418,61
		Jumlah (c)	
		Saldo 29 Feb 2016	
Keterangan Saldo:			
Uang tunai	Rp 71.094.936		
Bank BNI-46	Rp 637.688		
Bank Muamalat (BMT)	Rp 45.300.650		
BMT KJKS Al-Markaz	Rp 151.028.257,62		
Bank Syariah Mandiri	Rp 126.068.520,76		
BSI Syariah	Rp 61.750.000		
EPRS HIK	Rp 90.238.866,30		
Bank Salselbar	Rp 16.000.000		
Bank BRI	Rp 3500.000		
JUMLAH	Rp 465.618.918,61		

Gambar. 4.1

Laporan Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Februari 2016

- d. Komponen laporan neraca, penerimaan, pengeluaran dan laporan perubahan modal, sesuai dengan PSAK 45, adapun komponen tersebut digunakan oleh masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Al-Jihad Medan.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti adapun masjid yang sudah memadai laporan keuangannya dalam memberi informasi yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban yang akuntabel yaitu masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Al-Jihad Medan. Selanjutnya masjid Jogokarian Yogyakarta sudah memiliki laporan neraca, dan masjid Al-Markaz Makassar sudah memiliki laporan perencanaan anggaran untuk satu tahun, namun kedua masjid tersebut masih memiliki kekurangan dalam hal mengetahui informasi mengenai perubahan-perubahan penggunaan dana yang mungkin terjadi dan tidak mengetahui nilai aset dari masjid tersebut. Sedangkan masjid lainnya masih menggunakan pelaporan yang bersifat tradisional yaitu hanya laporan penerimaan dan pengeluaran.

3. Bentuk pembatasan dana pada masjid yang menjadi objek penelitian
 - a. Masjid yang tidak memiliki pembatasan dana, yaitu masjid Raya Binjai, Masjid Al-Jihad Medan, masjid Agung Binjai, Masjid Ar-Rahman Terjun Medan Marelan, Masjid raya Makassar, Masjid Pogung Raya Yogyakarta, Masjid Pogung Dalangan Jogjakarta dan Masjid Jogokarian yogyakarta, Masjid Baiturrahim BTN Skyline Jaya Pura, Masjid Baitussyakur, Masjid Jamik Birugo Bukit Tinggi, Masjid Darussalam KDA Batam Kuta- Kepri, Masjid At-Taqwa Batu Bara, dan Masjid raya Stabat.
 - b. Masjid Istiqlal memiliki bentuk pembatasan dana dalam hal ini dana permanen dan sumbangan terikat dari APBN, sedangkan masjid Al-Markaz Makassar memiliki sumbangan permanen dari Yusuf Kalla.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Tujuan akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, di mana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dalam hal ini umat dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Menurut kondisi ini, transaksi yang jarang atau tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun, akan muncul dalam organisasi nirlaba. Namun demikian, dalam prakteknya organisasi nirlaba, transaksi tersebut sering tampil dalam berbagai bentuk.

Akuntabilitas pada laporan keuangan masjid ini akan menjadi pertanggungjawaban masjid kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan masjid. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan persamaan dari pertanggungjawaban laporan

keuangan masjid, namun terdapat beberapa perbedaan dalam hal penyajian laporan keuangan masjid tersebut.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola masjid (BKM) untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan masjid sehingga pengelola masjid dapat melihat kontinuitas usaha apabila memiliki badan usaha seperti masjid Istiqlal Jakarta, masjid Jogokarian Yogyakarta dan masjid Al-jihad, periode akuntansi, kesatuan pengukuran, bukti yang objektif, pengungkapan sepenuhnya, secara konsistensi, serta realisasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Suatu informasi dikatakan objektif dan akuntabel apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada. Prinsip ini menekankan agar pembuktian dari pencatatan laporan keuangan masjid didasarkan oleh bukti-bukti yang jelas, misalnya dari bukti kuitansi dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian seluruh masjid yang menjadi objek penelitian memiliki pembuktian yang jelas dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang masjid.

Berdasarkan pemahaman dan analisis yang dilakukan peneliti mengenai akuntabilitas laporan keuangan masjid yang dilakukan peneliti melalui wawancara yang mendalam dengan pengurus dan bendahara masji yang menjadi objek penelitian ini, yaitu:

Tabel. 4.2
Bobot Penilaian Akuntabilitas

No	Nama Pengurus Masjid	Bobot Penilaian
1	Masjid Raya Makassar	75%
2	Masjid Istiqlal Jakarta	100%
3	Masjid Jogokarian Yogyakarta	70%
4	Masjid Pogung Dalangan Yogyakarta	65%
5	Masjid Al-Jihad Medan	100%
6	Masjid Ar-Rahman Medan Marelan	70%
7	Masjid Pogung Raya Yogyakarta	65%

8	Masjid Al-Markaz Makassar	75%
9	Masjid Raya Binjai	70%
10	Masjid Agung Binjai	70%
11	Masjid Baiturrahim BTN Skyline Jaya Pura	70%
12	Masjid raya Stabat	75%
13	Masjid Jamik Birugo Bukit Tinggi	70%
14	Masjid At-Taqwa Batu Bara	65%
15	Masjid Baitussyakur Batam	70%
16	Masjid Darussalam KDA Batam Kuta- Kepri	80%
17	Masjid Baitul Muqarrabin Aceh	70%
18	Masjid Baiturrahman Banda Aceh	100%

Dari hasil perhitungan tersebut, penulis menggunakan klasifikasi menurut *Basic Statistic for School Research* oleh Dean J. Champion, dengan interval klasifikasi sebagai berikut:

- 1) 0% - 25%. *No association or low association*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini tidak mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.
- 2) 26% - 50%. *Moderately low association*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini kurang mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.
- 3) 51% - 75%. *Moderately high association*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini cukup mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.
- 4) 76% - 100%. *High association up to prefect assocition*, berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini sangat mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas

laporan keuangan masjid tersebut.

Dari hasil kriteria tersebut yang berada pada bobot 51% - 75%. *Moderately high association* adalah masjid Raya Makassar, Masjid Jogokarian Yogyakarta, Masjid Pogung Dalangan Yogyakarta, Masjid Ar-Rahman Medan Marelان, Masjid Pogung Raya Yogyakarta, Masjid Al-Markaz Makassar, Masjid Raya Binjai, Masjid Agung Binjai, Masjid raya Stabat, Masjid Jamik Birugo Bukit Tinggi, Masjid Baiturrahim BTN Skyline Jaya Pura, Masjid Baitul Muqarrabin Aceh dan Masjid At-Taqwa Batu Bara berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini cukup mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.

Selanjutnya yang berada pada bobot 76% - 100%. *High association up to prefect assocition* adalah Masjid Darussalam KDA Batam Kuta- Kepri, masjid Istiqlal Jakarta, masjid Baiturrahman Banda Aceh dan masjid Al-Jihad Medan berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini sangat mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.

Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan sarana untuk mewujudkannya, yaitu dengan menerapkan akuntansi pada masjid. Seberapa besar peran akuntansi dalam masjid diukur dari seberapa besar manfaat akuntansi pada masjid. Paling tidak ada tiga manfaat akuntansi berdasarkan penelitian ini, yaitu:

- a. Mendapatkan informasi dari penyajian informasi yang akurat dan andal
- b. Mendorong terwujudnya akuntabilitas secara umum
- c. Memberikan pengendalian pada manajemen masjid
- d. Dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya peneliti menemukan perbedaan atau ketidakseragaman pencatatan laporan keuangan masjid-masjid yang menjadi objek penelitian. Dimana masjid-masjid yang memiliki pelaporan keuangan yang lebih baik memiliki badan usaha yang lebih terorganisir dengan baik, sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan masjid dan jamaah dengan sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih beragam dan dapat memberdayakan masyarakat sekitar dibandingkan dengan masjid yang hanya membuat

laporan keuangan mesjid dengan menggunakan 2 (dua) komponen pelaporan (penerimaan dan pengeluaran dana) saja. Dengan kata lain pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan mesjid untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran mesjid. Selain itu Pemberdayaan Ekonomi Umat dimaksudkan untuk mengubah perekonomian jamaah dari yang biasanya penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Pemberdayaan ekonomi umat ini dilakukan agar jamaah lebih produktif dalam menggunakan dana mesjid.

Prinsip Pengungkapan Sepenuhnya, konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai. Sehingga jelas informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban-beban mesjid tersebut. Peneliti melihat berbagai mesjid yang menjadi objek penelitian ada yang menggunakan prinsip ini yaitu mesjid Al-Jihad Medan dan mesjid Istiqlal Jakarta. Sedangkan mesjid yang belum menggunakan pengungkapan sepenuhnya dalam pembuatan laporan keuangannya, sehingga dalam hal pengambilan keputusan hanya berdasarkan laporan saldo akhir. Berbeda dengan mesjid Al-Markaz Makassar yang menggunakan laporan rencana anggaran, Mesjid Aljihad dan Istiqlal berdasar informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan Mesjid, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemampuan mesjid tersebut.

Informasi yang akurat dan andal dapat berguna bagi pengurus mesjid untuk pengambilan keputusan manajerial. Penerapan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dapat membantu pengurus untuk mengelola mesjid dengan efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan organisasi, dan efisiensi terkait dengan kewajaran besaran dana yang digunakan untuk membiayai sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi. Sedangkan untuk keperluan akuntabilitas publik, pengurus perlu menerapkan akuntansi keuangan. Tentunya, akuntansi keuangan yang sesuai dengan organisasi keagamaan adalah akuntansi untuk entitas nirlaba sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba. Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan yang harus disajikan adalah Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti hanya mesjid

Istiqlal Jakarta dan masjid Al-Jihad Medan yang membuat laporan-laporan tersebut.

Prinsip Konsistensi, Konsep ini menghendaki bahwa setiap instansi, termasuk lembaga sosial harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Hampir semua masjid yang menjadi objek penelitian belum memiliki standar akuntansi yang digunakan, terkecuali masjid Al-Jihad Medan dan masjid Istiqlal Jakarta yang menggunakan PSAK 45.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan sekali oleh pengurus kepada jama'ah. Karena jama'ah mempunyai hak untuk mengetahui arus kas Masjid, sementara pengurus mempunyai kewajiban untuk menyampaikan arus kas Masjid. Adapun transparansi laporan keuangan masjid yang menjadi objek penelitian, berupa pemberian informasi melalui informasi ke jamaah pada saat sebelum menjalankan shalat jumat, melalui mading masjid, melalui buletin/ majalah yang diterbitkan masjid dan melalui website masjid seperti masjid Jogokarian Yogyakarta, serta melalui media massa yang dilakukan masjid Istiqlal Jakarta dan Al-Jihad Medan, Sehingga selain pengurus dan jamaah sekitar yang bisa mengetahui, akan tetapi donatur yang bukan jamaah tetappun bisa mengetahui informasi laporan keuangan masjidnya, menimbulkan rasa kerpercayaan dan kenyamanan bagi jamaah yang jauh dari masjid bahkan luar negeri untuk melaksanakan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadakah dan Wakaf).

Kepercayaan sebagai makna akuntabilitas masjid. Pihak masjid mengakui bahwa pengelolaan masjid harus dilakukan secara terbuka, termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan apa yang telah dijalankan dan yang akan dilaksanakan. Keterbukaan antara pengurus masjid, donatur dan jamaah menjadi kunci solidnya suatu organisasi masjid. Keterbukaan dalam konteks ini merupakan sikap tidak menyembunyikan atau menyimpan secara diam-diam hal yang berhubungan dengan kepentingan masjid, baik itu hal positif maupun hal yang negatif. Dengan kata lain, sikap keterbukaan ini adalah bersikap jujur dan apa adanya, sehingga pengurus masjid-masjid yang menjadi objek penelitian mendapat kepercayaan jamaah.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti, adapun masjid yang melakukan audit menggunakan auditor independen dalam laporan keuangan masjidnya adalah masjid Istiqlal Jakarta dan masjid

Al-Jihad Medan. Sedangkan masjid lainnya yang menjadi objek penelitian ini tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan masjidnya. Realitas menunjukkan bahwa selama ini laporan keuangan di masjid-masjid tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh auditor independen. Hal ini sudah barang tentu mengurangi nilai akuntabilitas laporan keuangan masjid-masjid tersebut. Meskipun audit terhadap masjid dilakukan hanya sebatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan jamaah dan masjid, misalnya dalam hal pembangunan dan renovasi masjid, akan tetapi tidak ada salahnya ketika pelaksanaan audit tersebut diterapkan untuk mengaudit aktivitas keuangan masjid karena tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh beberapa oknum pengurus masjid yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu adanya audit masjid ini akan mengungkap apabila terjadi penyelewengan dana, walaupun tidak ditemukan adanya penyelewengan dana masjid, setidaknya akan memberikan transparansi pengelolaan dana sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kenaziran masjid tersebut.

Untuk memahami jauh kedalam konteks apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan kondisi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid, peneliti menyimpulkan beberapa masukan dari bendahara atau pengurus masjid-masjid yang menjadi objek penelitian, yaitu:

“Bagi mereka menghadirkan nuansa akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan paling tidak perlu dihidupkan dengan pola tata buku yang benar dalam penyusunan dan pelaporannya menggunakan software yang seragam untuk setiap masjid berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, kemudian dalam hal pengelolaan perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, tanggung jawab dan integritas, kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan pengawasannya (audit)”.

Sumber daya manusia menjadi penting untuk pengelolaan keuangan, paling tidak pengurus masjid memberikan kursus kilat kepada bendaharawan masjid dengan mengundang para pendidik yang kompeten/ahli untuk belajar atau sekedar memberikan kursus. misalnya; cara penyusunan laporan keuangan nirlaba, pemahaman mengenai bagaimana mengelola keuangan, mengaudit dan lain

sebagainya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan semacam itu, maka, diharapkan akan menambah pengetahuan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar. Berdasarkan informai yang diperoleh peneliti seluruh bendahara masjid yang menjadi objek penelitian ini telah mendapat pelatihan dan workshop mengenai pembuatan laporan keuangan masjid baik secara sederhana, sampai dengan pembuatan laporan sesuai PSAK 45.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun hambatan dalam proses pembuatan laporan keuangan masjid yang sesuai dengan PSAK 45, yaitu:

1. Bendahara bukan merupakan seorang akuntan yang memahami pembuatan laporan keuangan
2. Pencatatan masih menggunakan sistem manual dan menggunakan exceel, belum menggunakan aplikasi atau software khusus dalam pembuatan lapora keungan masjid.
3. Kurang konsistennya pembuatan laporan sesuai dengan jadwal yang rutin.
4. Kurangnya sosialisasi penerapan PSAK 45 mengenai laporan keuangan masjid.
5. Kurangnya pemahaman mengenai peranan dari informasi laporan keuangan dalam meningkatkan keefektifan dalam pengambilan keputusan.
6. Anggapan bahwa pengelolaan masjid sifatnya kerja sukarela untuk beribadah bukan profesional yang digaji, sehingga pelaporan keuangan kurang maksimal dilaksanakan

Aspek-aspek pengendalian internal yang baik terhadap penerimaan dan pengeluaran kas masjid sebagai berikut:

1. Aspek-aspek pengendalian internal terhadap penerimaan kas yaitu: (a) adanya penyaringan terhadap bendahara yang membuat laporan dan memberikan program pelatihan setelah mereka ditunjuk, misalnya dalam hal penggunaan aplikasi atau software akuntansi masjid; (b) menunjuk atau mengangkat bendahara tertentu sebagai yang men catat; (c) adanya pemisahan tugas antara pencatat dan yang mengumpulkan dana untuk masjid; (d) otorisasi yang layak atas penerimaan

- kas masjid di atas jumlah tertentu; dan (e) adanya dokumen pendukung dan pencatatan transaksi.
2. Aspek-aspek pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yaitu: (a) pengeluaran dalam jumlah besar harus diotorisasi oleh ketua BKM dan berdasarkan kesepakatan dengan pengurus lainnya; (b) pencatat laporan penerimaan yang menangani harus terpisah dengan yang mencatat pengeluaran kas atau pengeluaran harus ada pengesahan dari ketua BKM baik fisik maupun pernyataan; dan (c) adanya dokumen pendukung dan pencatatan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pada organisasi sederhana seperti masjid sekalipun sangat dibutuhkan nilai kejujuran dan profesionalisme. Nilai kejujuran dilakukan oleh pengurus melalui keterbukaan, jujur apa adanya dalam melaksanakan tugas kepengurusan masjid, karena hal tersebut menjadi kekuatan masjid. meskipun demikian, pengurus masjid dapat bekerja tanpa imbalan materi. Bagi mereka kepercayaan masyarakat merupakan imbalan yang luar biasa dan melebihi segalanya. Bukan sesuatu yang mudah menjaga kepercayaan tersebut, karena membutuhkan komitmen yang sangat tinggi dari seluruh pengurus masjid. Serta profesionalisme akan mendorong pembuatan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang lebih baik, sebagai pemberi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen masjid.

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa masjid yang memiliki pelaporan keuangan yang baik mengelola memberikan rasa kepercayaan kepada jamaah, tidak hanya yang berasal dari sekitaran masjid, tetapi juga jamaah dari luar lingkungan masjid. Sehingga masjid-masjid tersebut mengelola dana masjid dalam jumlah yang lebih besar dan memiliki aset yang bersifat produktif daripada masjid yang pelaporan keuangannya masih dalam koridor cukup baik. Karena Informasi keuangan yang baik merupakan output dari atas pengelolaan keuangan yang disajikan akan memberi dampak berupa perubahan perilaku. Teori signaling¹ membuktikan bahwa informasi keuangan dapat memberikan sinyal kepada para calon investor. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, informasi yang dihasilkan (informasi penggunaan uang atau sumberdaya lainnya) merupakan salah satu instrumen dalam sistem pengendalian manajemen.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Masjid yang sudah memadai laporan keuangannya dalam memberi informasi yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban yang akuntabel yaitu masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Al-Jihad Medan. Selanjutnya masjid Jogokarian Yogyakarta sudah memiliki laporan neraca, dan masjid Al-Markaz Makassar sudah memiliki laporan perencanaan anggaran untuk satu tahun, namun kedua masjid tersebut masih memiliki kekurangan dalam hal mengetahui informasi mengenai perubahan-perubahan penggunaan dana yang mungkin terjadi dan tidak mengetahui nilai aset dari masjid tersebut. Sedangkan masjid lainnya masih menggunakan pelaporan yang bersifat tradisional yaitu hanya laporan penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya masjid-masjid yang memiliki pelaporan keuangan yang lebih baik memiliki badan usaha yang lebih terorganisir dengan baik, sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan masjid dan jamaah dengan sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih beragam dan dapat memberdayakan masyarakat sekitar dibandingkan dengan masjid yang hanya membuat laporan keuangan masjid dengan menggunakan 2 (dua) komponen pelaporan (penerimaan dan pengeluaran dana) saja.
2. Dari hasil Dari hasil kriteria tersebut yang berada pada bobot 51% - 75%. *Moderately high association* adalah masjid Raya Makassar, Masjid Jogokarian Yogyakarta, Masjid Pogung Dalangan Yogyakarta, Masjid Ar-Rahman Medan Marelan, Masjid Pogung Raya Yogyakarta, Masjid Al-Markaz Makassar, Masjid Raya Binjai, Masjid Agung Binjai, Masjid raya Stabat, Masjid Jamik Birugo Bukit Tinggi, Masjid Baiturrahim BTN Skyline Jaya Pura, Masjid Baitul Muqarrabin Aceh dan Masjid At-Taqwa Batu Bara berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini cukup mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut. Selanjutnya yang berada pada bobot 76% - 100%. *High association up to*

perfect assocition adalah Masjid Darussalam KDA Batam Kuta- Kepri, masjid Istiqlal Jakarta, masjid Baiturrahman Banda Aceh dan masjid Al-Jihad Medan berarti penerapan prinsip akuntansi yang sudah dilaksanakan masjid selama ini sangat mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan masjid tersebut.

3. Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia perlu menghadirkan nuansa akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan paling tidak perlu dihidupkan dengan pola tata buku yang benar dalam penyusunan dan pelaporannya menggunakan software yang seragam berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, kemudian dalam hal pengelolaan perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, tanggung jawab dan integritas, kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan pengawasannya (audit). Selanjutnya pemberdayaan sumber daya manusia menjadi penting untuk pengelolaan keuangan, paling tidak pengurus masjid memberikan kursus kilat kepada bendaharawan masjid dengan mengundang para pendidik yang kompeten/ahli untuk belajar atau sekedar memberikan kursus pengelolaan keuangan masjid. Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan sarana untuk mewujudkannya, yaitu dengan menerapkan akuntansi pada masjid. Seberapa besar peran akuntansi dalam masjid diukur dari seberapa besar manfaat akuntansi pada masjid. Paling tidak ada tiga manfaat akuntansi berdasarkan penelitian ini, yaitu:
 - a. Mendapatkan informasi dari penyajian informasi yang akurat dan andal
 - b. Mendorong terwujudnya akuntabilitas secara umum
 - c. Memberikan pengendalian pada manajemen masjid
 - d. Dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlunya penyeragaman bentuk pelaporan akuntansi masjid dengan menggunakan software yang di sosialisasikan ke setiap masjid di Indonesia.
2. Sebaiknya masjid-masjid di Indonesia memaksimalkan organisasi perkumpulan masjid di Indonesia untuk

mensosialisasikan program penyeragaman bentuk pelaporan keuangan masjid, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai peranan dari informasi laporan keuangan dalam meningkatkan keefektifan dalam pengambilan keputusan.

3. Penggunaan *website* dan media sosial dalam menginformasikan pelaporan keuangan dan kegiatan-kegiatan masjid mendorong pemaksimalan sumber penerimaan masjid. Karena informasi tersebut tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia saja akan tetapi juga masyarakat internasional yang berkeinginan menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakafnya (ZISWAF).
4. Penggunaan Auditor internal atau eksternal dalam mengaudit laporan keuangan masjid dapat mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporannya dan memberikan pengaruh yang positif untuk memberikan transparansi pengelolaan dana sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kenaziran masjid tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan instrumen penelitian pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh bentuk pelaporan yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas laporan keuangan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu. *Tiga Pengurus Masjid Diperiksa (Dugaan Penyelewengan Pembangunan Masjid)*, <http://palembang-pos.com/tiga-pengurus-masjid-diperiksa-dugaan-penyelewengan-pembangunan-masjid/>. Di Unduh 10 Mei 2018.
- Ahmadi, Ruslan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruszz Media.
- Alquran Al Karim dan Terjemahnya. 2003. Semarang: Toha Putra.
- Astuti, Widia. 2010. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Medan: Perdana Publishing.
- Ayub, Moh.E. 2012. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hairil, Hiar. *Kasus Korupsi Masjid Masuk Sidang, Eks Bupati Sula Tak Ditahan*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2842801/kasus-korupsi-masjid-masuk-sidang-eks-bupati-sula-tak-ditahan>, Di Unduh 10 Mei 2018.
- Hani, Syafrida. 2015. *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Medan: UMSU PRESS.
- Hery, 2011. *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK 45 Revisi 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2017. Akuntabilitas Keuangan Masjid. dalam journal.
- Mubtadi, Novendi Arkham. 2017. *Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen)*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.

<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/590/448>. Diunduh 20 Oktober 2018.

Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pawit, M Yusup. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: kencana.

Rahayu, Ruci Arizanda. *Transparansi dan akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid*. Vol.4 No. 2, Oktober 2014. Alam e journal. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2088-0685 Vol.4 No. 2, Oktober 2014.

Rahayu, Ruci. 2014. *Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya*. dalam e-journal.

Ruslan, Ahmadi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruszz Media.

Salim. 2016. *Metodologi Penelitia Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Setiawan, KaRtum. 210. *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta*: Erlangga, Jakarta.

Sitompul, Mhd.Syahman, Dkk. 2015. *Akuntansi Masjid*. Medan: Febi UIN-SU Press.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian: MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian: MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yusup, Pawit M. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Kencana.